



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

LAKIP TAHUN 2025

Januari 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dapat melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dengan tepat waktu.

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh sekretariat, bagian, bidang kerja dan UPT Dinas Pendidikan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja sekretariat, bagian, bidang maupun UPT secara keseluruhan.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025. Pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 ditetapkan 7 sasaran dan 18 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 5 program pembangunan Pendidikan. Secara umum Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Padang, 28 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690921 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pendidikan merupakan salah satu perangkat daerah pada Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan laporan;
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan perencanaan;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas:

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) Penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi pengadministrasian surat masuk, surat keluar, pengelolaan arsip aktif dan in aktif serta membuat statistik surat masuk dan surat keluar;

- (b) Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan yang meliputi pendataan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan administrasi sarana prasarana dinas yang berupa barang dan jasa;
- (c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pendataan, analisis, pemetaan dan penyajian data pegawai, analisis jabatan dan beban kerja, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberian penghargaan dan pengelolaan pegawai honorer;
- (d) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan organisasi dinas, pelaksanaan program yang terdiri dari ketertiban dan keamanan, kebersihan dinas;
- (e) Pelaksanaan urusan protokoler dinas yang meliputi pengelolaan dan penyiapan ruang rapat/pertemuan;
- (f) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan untuk ketertiban karyawan;
- (g) Penyelenggaraan urusan kehumasan dan layanan informasi publik yang meliputi menghimpun data program dan kegiatan dinas, mempublikasikan serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
- (h) Penyelenggaraan administrasi perpustakaan yang meliputi inventarisasi koleksi, katalogisasi, menata ruang dan koleksi perpustakaan, memberikan layanan teknis perpustakaan;
- (i) Pelaksanaan pendataan, pencatatan, pembukuan dan pembaharuan data barang milik negara;
- (j) Pelaksanaan penyimpanan barang milik negara yang belum digunakan atau setelah digunakan;
- (k) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset di cabang dinas dan sekolah; dan
- (l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (a) Pelaksanaan proses permintaan surat penyediaan dana;
- (b) Pelaksanaan proses surat permintaan pembayaran;

- (c) Memproses tagihan pengeluaran belanja;
- (d) Pelaksanaan proses pertanggungjawaban keuangan;
- (e) Pelaksanaan proses surat perintah perjalanan dinas;
- (f) Penyelenggaraan akuntansi barang milik daerah;
- (g) Penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan oleh sekretariat, bidang dan cabang dinas serta UPTD;
- (h) Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan oleh sekretariat, bidang, cabang dinas dan UPTD;
- (i) Penyelenggaraan laporan keuangan tahunan, berupa jurnal, buku besar, neraca serta melaksanakan analisa laporan keuangan;
- (j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian dan peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;
- b) Menyusun rumusan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;
- c) Melaksanakan pembinaan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan bahasa Minangkabau;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;
- e) Membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa ;
- f) Menyelenggarakan pengkajian izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;

- g) Membina pengawasan dan pengendalian penggunaan buku teks peserta didik, buku pedoman guru dan buku penunjang lainnya;
- h) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pembangunan karakter, dan pengelolaan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa;
- i) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan pengelolaan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa ;
- j) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa dengan Cabang dinas;
- k) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa; dan
- l) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik;
- c) Penyelenggaraan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Kejuruan;
- d) Penyelenggaraan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan program keahlian Sekolah Menengah Kejuruan;
- e) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan buku teks peserta didik, buku pedoman guru dan buku penunjang lainnya;
- f) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pembangunan karakter, dan pengelolaan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- g) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Cabang dinas;
- h) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Sarana Prasarana

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- f) Menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- h) Menyiapkan bahan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengadaan sarana prasarana pada satuan

pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan

- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b) Penyelenggaraan pendataan, pemetaan, penyediaan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi dan pengembangan karir, serta peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c) Penyelenggaraan pembinaan calon kepala sekolah, tenaga pendidik dan pengawas sekolah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa ;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- 1) Sekretariat, terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - (2) Sub Bagian Keuangan

- 2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 4) Bidang Sarana dan Prasarana
- 5) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
- 6) Cabang Dinas Wilayah I-VIII
- 7) UPTD Balai TIK, dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2025 tercatat sebanyak 13.906 orang yang terdiri dari 8.883 orang PNS dan 5.023 orang PPPK, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah ASN
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

No	Gol/Ruang	Eselon						Non Eselon					Jumlah
		I	II	III A	III B	IV A	IV B	Guru	Pengawas	Fungsional Non Guru	Staf	PPPK	
	GOLONGAN IV												
1	Golongan IV/e								1				1
2	Golongan IV/d		1					11	3				15
3	Golongan IV/c				1			936	43				980
4	Golongan IV/b			3	5	1		1.784	13		2		1.808
5	Golongan IV/a			1	2	12	2	754	8		20		799
	Jumlah Golongan IV	-	1	4	8	13	2	3.485	68		22	-	3.603
	GOLONGAN III												
1	Golongan III/d					14	20	2.862	2	1	98		2.997
2	Golongan III/c					1	17	389			71		478
3	Golongan III/b							1.192			87		1.279
4	Golongan III/a							117			151	5.023	5.291
	Jumlah Golongan III	-	-	-	-	15	37	4.560	2	1	407	5.023	10.045
	GOLONGAN II												
1	Golongan II/d							2			37		39
2	Golongan II/c							1			187		188
3	Golongan II/b										11		11
4	Golongan II/a										13		13
	Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	-	3	-	-	248	-	251

No	Gol/Ruang	Eselon						Non Eselon					Jumlah
		I	II	III A	III B	IV A	IV B	Guru	Pengawas	Fungsional Non Guru	Staf	PPPK	
	GOLONGAN I												
1	Golongan I/d										4		4
2	Golongan I/c										2		2
3	Golongan I/b										1		1
4	Golongan I/a												-
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
	JUMLAH TOTAL	-	1	4	8	28	39	8.048	70	1	684	5.023	13.906

1.2. Aspek Strategis Dinas Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
2. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan;
3. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal;
4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pelaksanaan pengendalian perizinan pendidikan
6. Penguatan pengembangan bahasa dan sastra.

Ketercapaian Aspek Strategis Organisasi dari sisi kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dan sesuai visi pembangunan Sumatera Barat 2021–2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka misi yang terkait dengan Urusan Pendidikan mengacu kepada Misi Pertama yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing”**. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu **“Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing”**. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran terkait dengan Urusan Pendidikan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”**.

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi

Permasalahan utama penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
2. Kebutuhan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal belum bersinergi antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Masih belum meratanya kesejahteraan guru terutama yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
4. Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
5. Masih kurangnya SMK yang unggul berbasis potensi daerah maupun jurusan pendidikan yang ramah dunia kerja.
6. Belum optimalnya pengembangan karakter berdasarkan minat, bakat dan kreativitas siswa.
7. Masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
8. Belum meratanya akses dan mutu sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sehingga lulusan SLB belum terserap secara maksimal di dunia kerja.
9. Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

Disamping itu adanya beberapa tantangan atau ancaman dari luar yakni:

1. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
2. Pesatnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Provinsi tetangga;
3. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
4. Disorientasi penggunaan teknologi informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

1. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi Pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing”.

Untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi tersebut serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maka tujuan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”**. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik;
- 4) Meningkatkan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta

Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing								
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan								
Indikator	: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	53,80	54,72	55,65	56,57	57,50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	%	93,22	94,70	96,20	97,70	99,20
		2. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persentase SMA Negeri terakreditasi	%	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50
			Persentase SMK Negeri terakreditasi	%	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75
			Persentase SLB Negeri terakreditasi	%	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		3. Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45	
			Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	27,4	27,70	28,01	28,32	28,63	
		4. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	%	31,5	32	34	35	40	
			Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	%	37	37,5	38	39	40	
			Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	%	49,33	52,17	53,40	55,22	56	
			Jumlah SMK yang terevitalisasi	Unit	3	6	9	12	16	
			5. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	%	97,36	98,04	98,72	99,37	100
				Persentase Guru Kejuruan SMK	%	50	55	56	60	65

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			yang mempunyai pengalaman kerja di Industri						
			Persentase Guru yang bersertifikasi	%	78,85	60	62	64	66
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	%	82,45	87,17	91,24	95,95	100

2.2. Perjanjian Kinerja

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	84,49 %
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	81,93 %
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	99,58 %
		2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	99,14 %
		3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	93,33 %
3.	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	Persentase siswa dengan nilai	76,08 %
		1. kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase Siswa dengan nilai	62,48 %
		2. kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
4.	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,98 %
		2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,93 %
		3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	54,14 %
		4. Jumlah SMK yang terevitalisasi	52 unit
5.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	99,64 %
		2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	60,93 %
		3. Persentase Guru yang bersertifikasi	65,90 %
		4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	95,95 %
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,4 (A)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91 %

Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mengalami perubahan karena adanya pergantian pejabat struktural Eselon II di Tahun 2025. Pada target indikator kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilakukan perubahan dalam penetapan target berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, dimana ada beberapa realisasi indikator kinerja yang telah mencapai target indikator kinerja. Selanjutnya anggaran yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM	APBD AWAL (Rp)	APBD-P (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.774.461.611.986	1.899.693.698.125
2	Program Pengelolaan Pendidikan	651.345.972.784	702.084.118.864
3	Program Pengembangan Kurikulum	300.000.000	81.227.000
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.229.646.511	493.370.011
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	100.000.000	-
6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	49.600.000	19.569.000
	JUMLAH	2.427.486.831.281	2.602.371.983.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

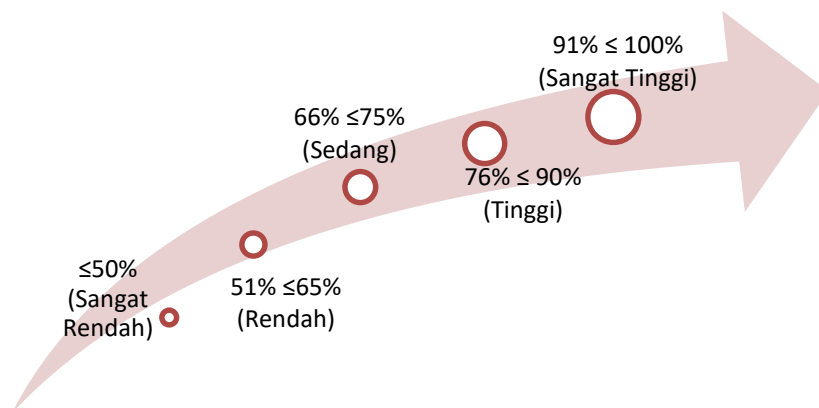
2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%Capaian
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	84,49 %	90,32%	106,90
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	81,93 %	90,21%	110,11
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	100 %	97,60%	97,60
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	99,58 %	97,93%	98,35
		2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	99,14 %	98,29%	99,14
		3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	93,33 %	87,88%	94,16
3.	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	76,08 %	73,56%	96,69
		2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	62,48 %	64,27%	102,87

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%Capaian
4.	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,98 %	89,10%	108,69
		2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,93 %	29,85%	43,95
		3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	54,14 %	32,42%	59,88
		4. Jumlah SMK yang terevitalisasi	52 unit	51 unit	98,08
5.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	99,64 %	98,11%	98,46
		2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	60,93 %	61,46%	100,86
		3. Persentase Guru yang bersertifikasi	65,90 %	71,88%	109,08
		4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	95,95 %	93,72%	97,68
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,4 (A)	70,17 (BB)	87,28
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91 %	86%	94,51

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi, pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat pada analisis berikut.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Sumatera Bara Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang terkait dengan Urusan Pendidikan adalah Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai terkait Urusan Pendidikan yaitu

Meningkatnya Kualitas Pendidikan. Berdasarkan hal inilah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan 1 tujuan dan 5 sasaran.

Pada tujuan ini, yaitu **Meningkatnya Kualitas Pendidikan** dengan 2 indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Indikator kinerja harapan lama sekolah (HLS), pada tahun 2025 dengan target sebesar 14,09 terealisasi sebesar 14,31 atau sebesar 101,56%. Dan indikator kinerja rata-rata lama sekolah (RLS), pada tahun 2025 dengan target sebesar 9,47 terealisasi sebesar 9,77 atau sebesar 103,17%. Sumber data indikator kinerja tujuan RLS dan HLS didapat melalui website resmi Badan Pusat Statistik.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Tujuan HLS dan RLS Tahun 2024 dan 2025

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	2024	2025	
		Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,30	14,09	14,31
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,44	9,47	9,77

Sumber : diperoleh dari <https://sumbar.bps.go.id/id>

Indikator rata-rata lama sekolah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 9,44 dengan target tahun 2025 sebesar 9,47 ditetapkan lebih tinggi. Dan indikator harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 14,30 dengan target tahun 2025 sebesar 14,09 ditetapkan lebih rendah, sehingga untuk target tahun 2026 sebesar 14,51 telah ditetapkan lebih tinggi dari realisasi 2025 berdasarkan penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030.

Upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tujuan tersebut akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Dinas Pendidikan menetapkan meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut ada 3 yaitu: (1) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, (2) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, dan (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah siswa yang diperoleh dari Dapodik dan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Ketiga indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang sama, karena secara substantif memiliki sasaran yang sejalan yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Intervensi kebijakan yang dilakukan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan pendidikan, serta penguatan layanan pendidikan inklusif dan khusus secara bersamaan berkontribusi terhadap capaian ketiga indikator tersebut.

Perbedaan utama diantara ketiga indikator kinerja tersebut hanya terletak pada aspek pengukuran, khususnya formula perhitungan dan kelompok usia sasaran yang digunakan. Indikator pertama fokus pada partisipasi penduduk usia sekolah menengah 16-18 tahun, indikator kedua menitikberatkan pada partisipasi penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus, sedangkan indikator ketiga (APK Pendidikan Menengah) mengukur partisipasi seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan menengah tanpa membatasi usia.

Meskipun memiliki definisi dan formula perhitungan yang berbeda, ketiga indikator kinerja tersebut secara operasional tidak memerlukan program/kegiatan/sub kegiatan yang terpisah, karena capaian kinerjanya dihasilkan dari upaya dan intervensi yang sama. Perbedaan capaian antar-indikator lebih mencerminkan variasi kelompok sasaran dan metode pengukuran. Dengan demikian, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan di akhir setelah analisis capaian ketiga indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus tergambar pada tabel.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	84,49	90,32	106,90
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	81,93	90,21	110,11
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	97,60	97,60
Rata-rata Capaian			104,87

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

Sasaran meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diukur dengan menggunakan 3 indikator di atas tercapai dengan **rata-rata capaian 104,87%**, termasuk kategori **“Sangat Tinggi”**. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

1) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah ditargetkan 73,65%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 84,49% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	84,49	90,32	106,90	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah di tahun 2025 ditargetkan 84,49% terealisasi 90,32% dengan tingkat capaian 106,90% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% = \frac{276.876}{306.549} \times 100\% = 90,32\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dihitung menggunakan rumus:

Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun diperoleh dari siswa jenjang SMA umur 16-18 tahun = 161.128, siswa jenjang SMK umur 16-18 tahun = 84.108, dan siswa jenjang MA/ sederajat dibawah Kemenag umur 16-18 tahun = 31.640, sehingga didapatkan Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah 16-18 tahun sebesar = 276.876.

Adapun Jumlah penduduk usia 16-18 tahun diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sebesar 306.549. Berikut data dukung dalam memperoleh realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah:

Tabel 3.5. Data Dukung Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

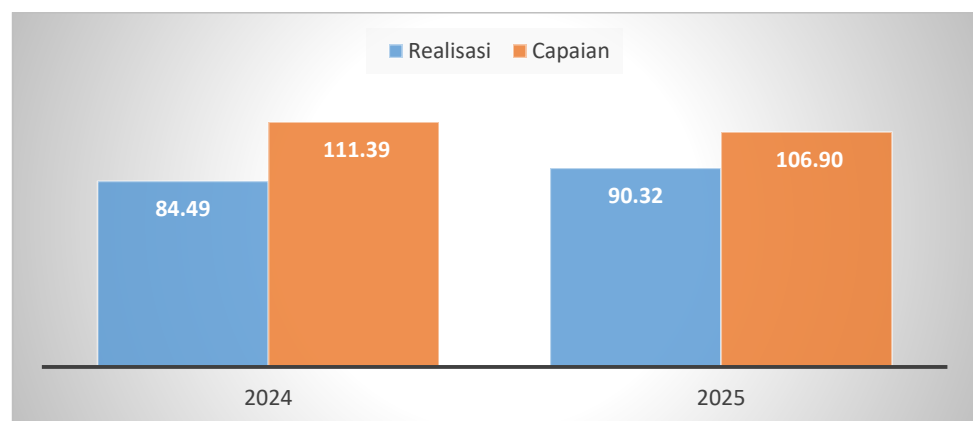
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Siswa Usia Sekolah (4-18)	Jumlah Siswa Keseluruhan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Penduduk Disabilitas Usia Sekolah (4-18)	APK	APM
1	SMA	161.128		169.153	306.549	6.550	55,18%	52,56%
2	SMK	84.108		85.626			27,93%	27,44%
3	SLB		5.909	7.186			109,71%	90,21%
4	MA	31.640		37.231			12,15%	10,32%
	TOTAL	276.876	5.909	299.196	306.549	6.550	97,60%	90,32%

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perhitungan capaian Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja sebesar 106,90% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 4,49% di tahun 2025. Namun, secara absolut nilai Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tahun 2025 meningkat 5,83 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.1. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 & 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 73,72%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 90,32% menunjukkan pencapaian sebesar 122,52% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

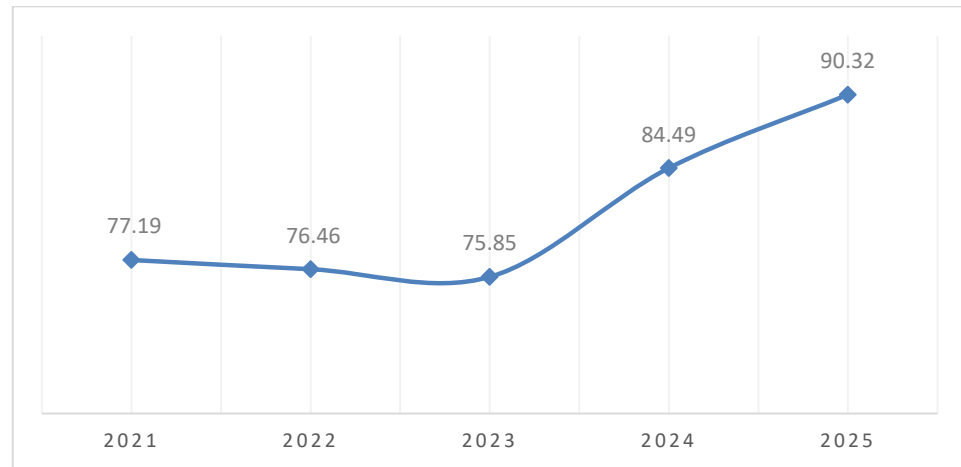
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,72	90,32	122,52

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 90,32%. Perkembangan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16–18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi lainnya berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 85,04% serta menempati peringkat ke-5 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 3.7. Persentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2025			
		7-12	13-15	16-18	19-23
1	DI Yogyakarta	99,61	99,6	93,03	54,72
2	Bali	99,57	98,88	90,68	34,32
3	Kep. Riau	99,71	98,6	88,24	26,61
4	DKI Jakarta	99,32	98,74	88,22	34,21
5	Sumatera Barat	99,63	97	85,04	38,84
6	Kalimantan Timur	99,64	97,34	84,15	33,15
7	Kalimantan Utara	99,14	95,96	81,93	29,25

No	Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2025			
		7-12	13-15	16-18	19-23
8	Papua	97,51	97,32	81,78	38,16
9	Papua Barat Daya	98,67	96,38	81,7	35,19
10	Jawa Timur	99,28	97,15	80,96	28,9
11	Aceh	99,38	97,65	80,94	34,95
12	Bengkulu	99,29	97,01	80,48	34,18
13	Maluku Utara	99,04	97,08	79,62	25,38
14	Sulawesi Tenggara	99,05	96,53	79,58	33,67
15	Nusa Tenggara Barat	99,38	96,92	79,21	28,88
16	Jawa Tengah	99,54	97,05	77,97	27,44
	INDONESIA	99,23	96,3	77,86	29,13
17	Papua Barat	97,59	96,22	77,53	34,53
18	Sumatera Utara	99,54	97,67	77,51	30,48
19	Riau	99,74	95,47	77,42	33,03
20	Maluku	99,56	97,75	77,28	29,66
21	Nusa Tenggara Timur	98,89	95,44	76,65	31,41
22	Kep. Bangka Belitung	99,49	92,9	76,03	21,13
23	Sulawesi Selatan	99,21	94,22	75,94	33,8
24	Jawa Barat	99,5	96,58	75,8	27,98
25	Sulawesi Tengah	98,56	94,58	75,36	26,5
26	Lampung	99,62	95,72	75,35	20,68
27	Kalimantan Selatan	99,14	93,82	75,16	30,91
28	Jambi	99,45	95,59	74,39	25,23
29	Banten	99,52	97,11	73,84	24,45
30	Sumatera Selatan	99,5	95,68	73,78	21,24
31	Sulawesi Barat	98,56	92,3	73,22	23,55
32	Gorontalo	98,85	92,35	72	35,02
33	Sulawesi Utara	99,28	96,11	71,45	25,57
34	Kalimantan Barat	98,95	94,36	70,95	26,84
35	Kalimantan Tengah	99,45	95,74	70,76	24,91
36	Papua Selatan	91,65	89,29	66,97	27,57
37	Papua Pegunungan	82,24	71,08	50,79	12,48
38	Papua Tengah	80,13	67,86	44,61	15,48

Sumber : diperoleh dari <https://www.bps.go.id/id>

2) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus ditargetkan 56,57%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 81,93% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.8. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	81,93	90,21	110,11	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus di tahun 2025 ditargetkan 81,93% terealisasi 90,21% dengan tingkat capaian 110,11% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan khusus usia 4 - 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 4 - 18 tahun}} \times 100\% = \frac{5.909}{6.550} \times 100\% = 90,21\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dihitung menggunakan rumus:

Jumlah siswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan khusus 4-18 tahun diperoleh dari siswa jenjang SLB umur 4-18 tahun = 5.909.

Adapun Jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 4-18 tahun diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sebesar 6.550. Berikut data dukung dalam memperoleh realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus:

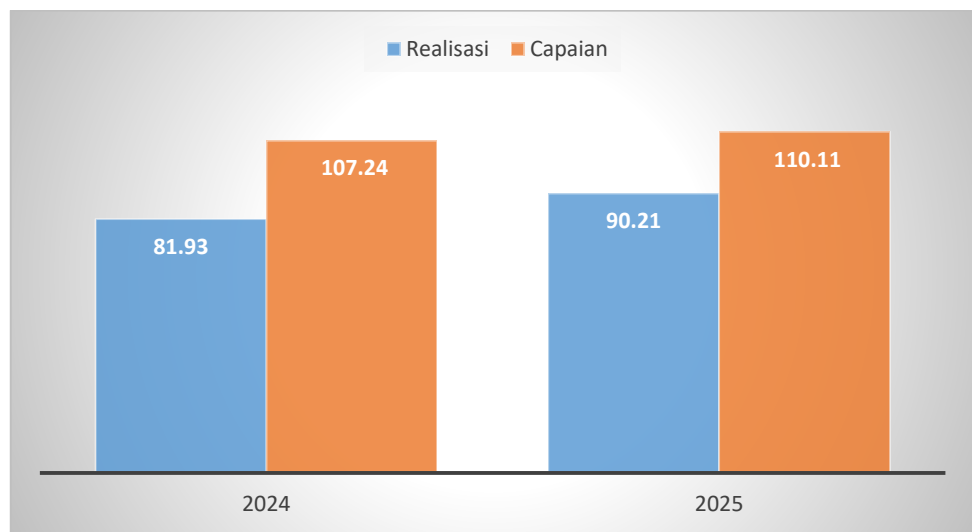
Tabel 3.9. Data Dukung Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Siswa Usia Sekolah (4-18)	Jumlah Siswa Keseluruhan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Penduduk Disabilitas Usia Sekolah (4-18)	APK	APM
1	SMA	161.128		169.153	306.549	6.550	55,18%	52,56%
2	SMK	84.108		85.626			27,93%	27,44%
3	SLB		5.909	7.186			109,71%	90,21%
4	MA	31.640		37.231			12,15%	10,32%
TOTAL		276.876	5.909	299.196	306.549	6.550	97,60%	90,32%

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus sebesar 110,11% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan kenaikan 2,87% di tahun 2025. Secara absolut nilai realisasi kinerja ini tahun 2024 juga meningkat 8,28 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.3. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 57,50%. Realisasi tahun 2025 tercapai sebesar 90,21% menunjukkan pencapaian sebesar 156,89% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan telah berhasil mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

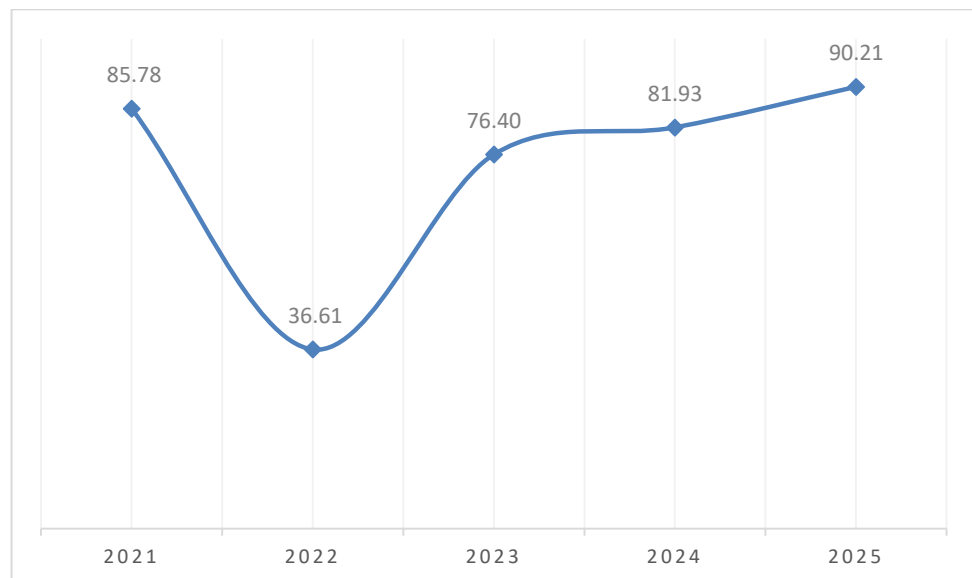
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	57,50	90,21	156,89

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat partisipasi warga negara usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi tercatat sebesar 85,78%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 36,61%. Selanjutnya tingkat partisipasi kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, serta mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar 90,21%. Perkembangan tingkat partisipasi warga negara usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus pada periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4. Perkembangan tingkat partisipasi warga negara usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4–18 Tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menyediakan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan rentang usia 4–18 tahun bagi penyandang disabilitas.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah ditargetkan 97,70%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 100% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.11. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100,00	97,60	97,60	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

Indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah di tahun 2025 ditargetkan 100% terealisasi 97,60% dengan tingkat capaian 97,60% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah diperoleh melalui perhitungan/rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% = \frac{299.196}{306.549} \times 100\% = 97,60\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dihitung menggunakan rumus:

Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah diperoleh dari jumlah siswa jenjang SMA = 169.153, jumlah siswa jenjang SMK = 85.626, jumlah siswa jenjang SLB = 7.186, dan jumlah siswa jenjang MA/ sederajat

dibawah Kemenag = 37.231, sehingga didapatkan Jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah sebesar = 299.196.

Adapun Jumlah penduduk usia 16-18 tahun diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sebesar 306.549. Berikut data dukung dalam memperoleh realisasi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah:

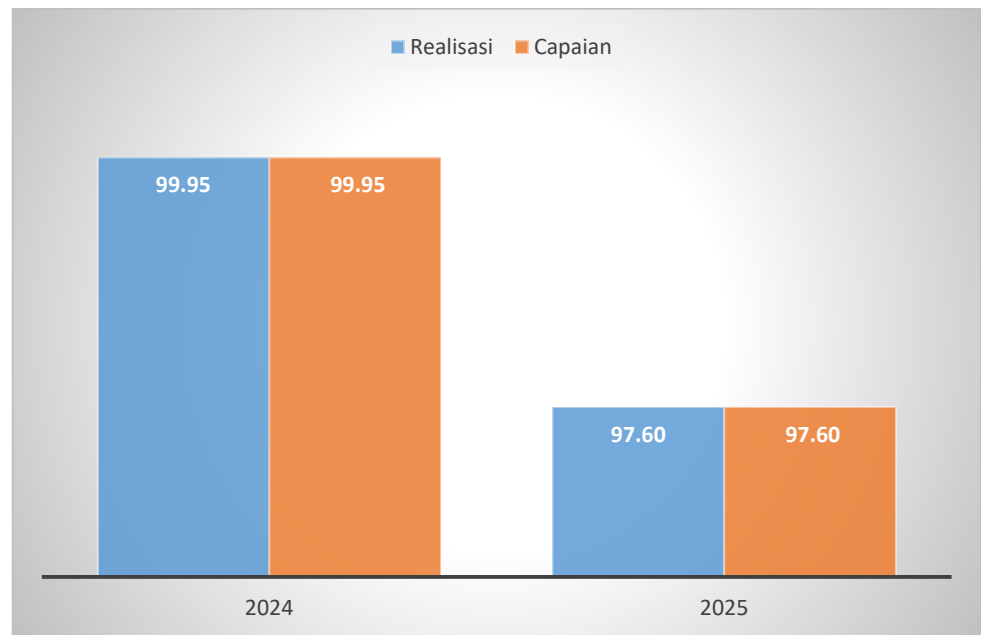
Tabel 3.12. Data Dukung Indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Siswa Usia Sekolah (4-18)	Jumlah Siswa Keseluruhan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (16-18)	Jumlah Penduduk Disabilitas Usia Sekolah (4-18)	APK	APM
1	SMA	161.128		169.153	306.549	6.550	55,18%	52,56%
2	SMK	84.108		85.626			27,93%	27,44%
3	SLB		5.909	7.186			109,71%	90,21%
4	MA	31.640		37.231			12,15%	10,32%
	TOTAL	276.876	5.909	299.196	306.549	6.550	97,60%	90,32%

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah sebesar 97,60% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 2,35% di tahun 2025. Dan secara absolut nilai realisasi tahun 2025 juga mengalami penurunan 2,35 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 99,20%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 97,60% menunjukkan pencapaian sebesar 98,39% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

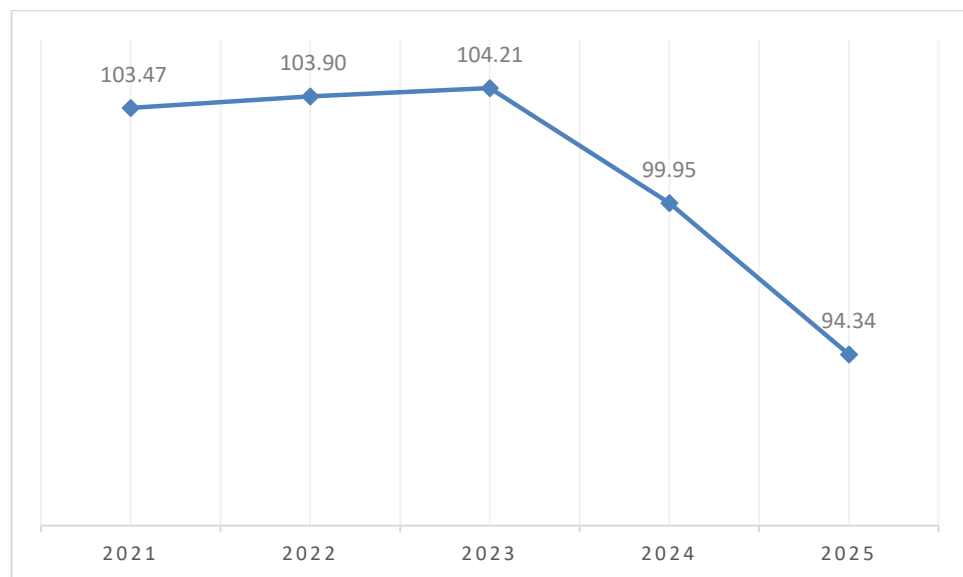
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	99,20	97,60	98,39

Sumber : diolah dari data Dapodik dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II Tahun 2025

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 104,21%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.6. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi lainnya berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 95,34% serta menempati peringkat ke-8 secara nasional setelah Provinsi Papua Barat. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 3.14. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan SM/ sederajat Tahun 2025
1	Kalimantan Timur	99,59
2	DI Yogyakarta	98,92
3	Aceh	98,46
4	Sumatera Utara	98,33
5	Kalimantan Utara	97,87
6	Bengkulu	96,07
7	Papua Barat	95,42
8	Sumatera Barat	95,34
9	Sulawesi Tenggara	93,74
10	Maluku	93,64
11	Maluku Utara	92,62
12	Bali	92,58
13	Sulawesi Tengah	91,65
14	Nusa Tenggara Barat	91,23
15	Nusa Tenggara Timur	91,14
16	Jawa Tengah	91,11
17	Kalimantan Barat	90,85
18	Kep. Riau	90,65
19	Gorontalo	90,58
20	Sulawesi Selatan	89,71
	INDONESIA	89,53
21	Sulawesi Utara	89,31
22	Jambi	89,28
23	Jawa Timur	89,03
24	Sumatera Selatan	88,9
25	Papua Barat Daya	87,95
26	Lampung	87,67
27	Sulawesi Barat	87,34
28	Kalimantan Tengah	87,24
29	Kalimantan Selatan	86,97
30	Kep. Bangka Belitung	86,87
31	DKI Jakarta	86,7
32	Jawa Barat	86,41
33	Papua	86,3
34	Riau	86,01
35	Banten	82,97
36	Papua Selatan	77,63

No	Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan SM/ sederajat Tahun 2025
37	Papua Tengah	54,82
38	Papua Pegunungan	54,52

Sumber : diperoleh dari <https://www.bps.go.id/id>

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus adalah sebagai berikut:

- a) Penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk meningkatkan partisipasi sekolah di jenjang pendidikan menengah, yang merupakan salah satu program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026. Pada tahun 2025 ini ada 8 RKB di jenjang SMA, 3 USB dan 1 RKB di jenjang SMK.
- b) Memberikan beasiswa kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah untuk anak daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan penerima di jenjang SMA sebanyak 510 orang, di jenjang SMK sebanyak 242 orang, di jenjang SLB sebanyak 300, serta berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang.
- c) Memberikan perlengkapan dasar peserta didik.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus antara lain:

- a) Keterbatasan Anggaran Pembangunan
- b) Proses perizinan dan pembebasan lahan untuk pembangunan USB
- c) Keterbatasan lahan sekolah dalam penambahan RKB
- d) Penyesuaian prioritas kebutuhan

Untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan akan mengupayakan untuk:

- a) Penganggaran bertahap sesuai kemampuan fiskal

- b) Penyediaan dan legalisasi lahan sekolah
- c) Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta penetapan prioritas wilayah berdasarkan kebutuhan
- d) Pengendalian mutu pembangunan dan waktu pelaksanaan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun 2025 berjumlah 3 orang. PPTK pada Bidang Sarana dan Prasarana memiliki tugas mengendalikan, mengelola, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dokumen anggaran sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja.

- b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Ketersediaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan sistem pembelajaran di mana peserta didik dan pengajar terpisah secara fisik, namun tetap berinteraksi menggunakan teknologi informasi, komunikasi, atau media lain. Melalui implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dapat ditingkatkan sehingga mendukung perluasan akses dan pemerataan pendidikan.

- c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus adalah sebesar Rp.476.461.282.529,- terealisasi sebesar Rp.466.803.213.666,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 97,97%. Sisa anggaran sebesar Rp.9.658.068.863,- (2,03%) berasal dari waktu pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan tidak mencukupi, efisiensi perjalanan dinas yang

menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan, dan jumlah dana rajawali awal di DPA tidak sama dengan suku bunga dari PT Rajawali.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 104,87% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 67,24%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{**Tingkat Efisiensi**} &= \\
 &= \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\text{Rp } 476.461.282.529 \times 104,87\%) - \text{Rp } 466.803.213.666}{\text{Rp } 476.461.282.529} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 32.861.733.322}{\text{Rp } 476.461.282.529} \times 100\% = \mathbf{0,07}
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{0,07}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= \mathbf{67,24\%}
 \end{aligned}$$

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp.476.461.282.529,- berada pada Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan 21 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1 Pembangunan Asrama Sekolah	1	unit	1	unit	150.000.000	143.014.082
				2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	79	unit	77	unit	16.854.814.131	15.951.611.135
				3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2	ruang	1	ruang	600.000.000	277.760.324
	4 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.028	paket	1.028	paket	550.000.000	445.507.600	
	5 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah			16	unit	12	unit	5.813.242.454	3.763.269.000	
2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang										

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
	berpartisipasi dalam pendidikan khusus 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah			6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	2.018	peserta didik	2.018	peserta didik	5.497.202.000	4.353.380.000
				7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	346	satuan pendidikan	346	satuan pendidikan	244.472.218.000	243.334.466.455
				8	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	unit	15	unit	2.661.700.000	2.587.235.845
				9	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	1	unit	1	unit	163.457.000	163.457.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
				10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10	ruang	8	ruang	4.049.000.000	3.006.669.179	
			2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3	unit	3	unit	2.633.673.524	2.633.673.524
				2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	37	unit	37	unit	8.465.883.190	8.009.197.902	
				3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.496	paket	2.496	paket	560.224.000	560.224.000	
				4	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	1	unit	-	unit	350.000.000	-	
				5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	216	satuan pendidikan	216	satuan pendidikan	137.422.760.000	135.925.490.638	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
				Menengah Kejuruan								
				6 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	unit	4	unit	750.000.000	716.306.275		
				7 Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	ruang	1	ruang	428.946.937	406.289.159		
				8 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	5	ruang	5	ruang	696.111.293	687.833.564		
			3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	unit	2	unit	350.000.000	338.715.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
				2	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	1	unit	1	unit	360.000.000	314.986.500
				3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	184	satuan pendidikan	184	satuan pendidikan	43.632.050.000	43.184.126.484
									TOTAL	476.461.282.529	466.803.213.666

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Dinas Pendidikan menetapkan meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut ada 3 yaitu: (1) Persentase SMA Negeri terakreditasi, (2) Persentase SMK Negeri terakreditasi, dan (3) Persentase SLB Negeri terakreditasi.

Upaya peningkatan Persentase SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri terakreditasi dilaksanakan secara terpadu karena ketiga indikator kinerja tersebut memiliki karakteristik, standar penilaian, serta mekanisme akreditasi yang sama, yaitu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan kebijakan Badan Akreditasi Nasional. Oleh karena itu, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan di akhir setelah analisis capaian ketiga indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus tergambar pada tabel.

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase SMA Negeri terakreditasi	99,58	97,93	98,35
Persentase SMK Negeri terakreditasi	99,14	98,29	99,14
Persentase SLB Negeri terakreditasi	93,33	87,88	94,16
Rata-rata Capaian			97,22

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diukur dengan menggunakan 3 indikator di atas tercapai dengan **rata-rata capaian 97,22%**, termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

1) Persentase SMA Negeri Terakreditasi

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Pada tahun 2025 ini indikator Persentase SMA Negeri terakreditasi ditargetkan 93,49%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 99,58% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator kinerja telah melebihi target yang ada di dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja Persentase SMA Negeri terakreditasi di tahun 2025 ditargetkan 99,58% terealisasi 97,93% dengan tingkat capaian 98,35% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.17. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase SMA Negeri terakreditasi	99,58	97,93	98,35	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

Realisasi indikator kinerja ini diperoleh melalui perhitungan/rumus sebagai berikut:

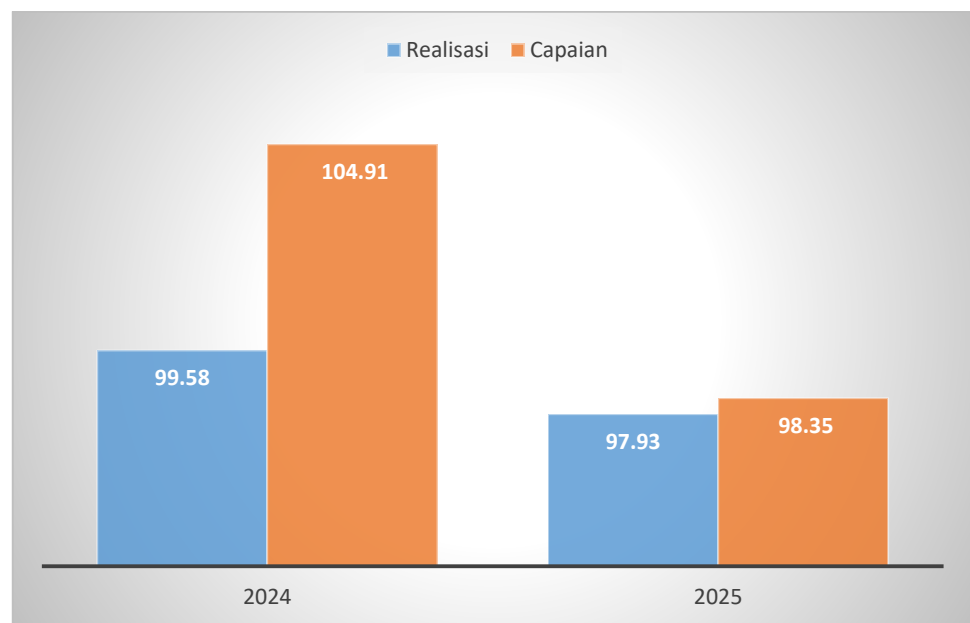
$$\frac{\text{Jumlah SMA Negeri terakreditasi}}{\text{Jumlah SMA Negeri secara total}} \times 100\% = \frac{237}{242} \times 100\% = 97,93\%$$

Persentase SMA Negeri terakreditasi dihitung dari Jumlah SMA Negeri terakreditasi sebanyak 237 sekolah dibagi dengan Jumlah seluruh SMA Negeri sebanyak 242 sekolah, maka didapatkan persentase sebesar 97,93%. Adapun angka jumlah SMA Negeri terakreditasi diperoleh melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Persentase SMA Negeri terakreditasi sebesar 98,35% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 6,56% di tahun 2025. Secara absolut nilai Persentase SMA Negeri terakreditasi tahun 2025 hanya mengalami sedikit penurunan 1,65 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya Unit Sekolah Baru yang terbangun sehingga status sekolah masih belum terakreditasi. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.7. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Persentase SMA Negeri terakreditasi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 95,50%. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 97,93% menunjukkan pencapaian sebesar 102,55% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Hal ini

menunjukkan Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

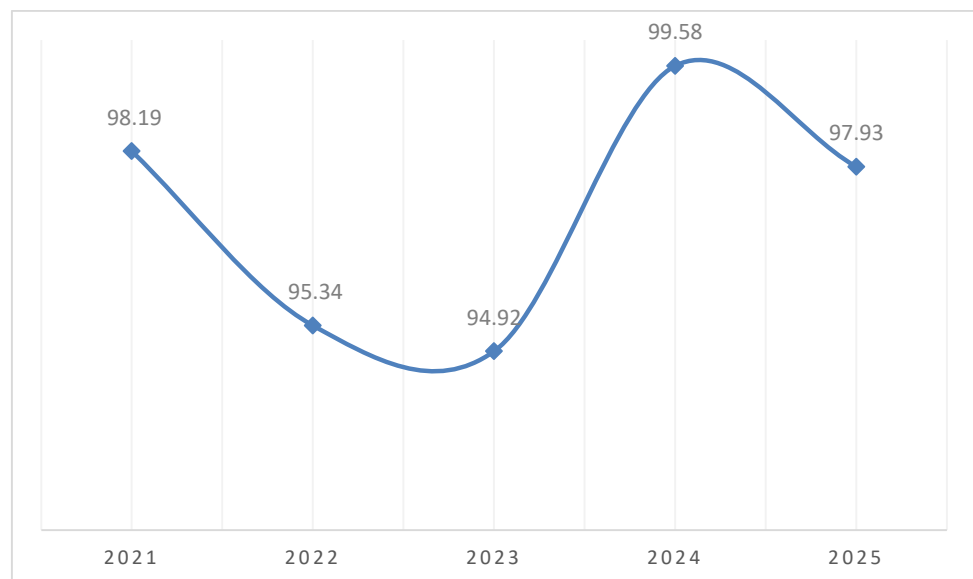
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase SMA Negeri terakreditasi	95,50	97,93	102,55

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase SMA Negeri terakreditasi mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 99,58%. Perkembangan Persentase SMA Negeri terakreditasi tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.8. Perkembangan Persentase SMA Negeri terakreditasi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Persentase SMA Terakreditasi di Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 99,41% serta

menempati peringkat ke-17 secara nasional, setelah Provinsi Riau. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.19. Persentase SMA Terakreditasi Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Persentase SMA terakreditasi (%)
1	Prov. D.K.I. Jakarta	100,00
2	Prov. D.I. Yogyakarta	100,00
3	Prov. Kalimantan Tengah	100,00
4	Prov. Kalimantan Selatan	100,00
5	Prov. Kalimantan Timur	100,00
6	Prov. Bali	100,00
7	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	100,00
8	Prov. Gorontalo	100,00
9	Prov. Sulawesi Barat	100,00
10	Prov. Kalimantan Utara	100,00
11	Luar Negeri	100,00
12	Prov. Papua Tengah	100,00
13	Prov. Papua Selatan	100,00
14	Prov. Sumatera Selatan	99,83
15	Prov. Sumatera Utara	99,81
16	Prov. Riau	99,79
17	Prov. Sumatera Barat	99,71
18	Prov. Sulawesi Selatan	99,67
19	Prov. Jawa Timur	99,66
20	Prov. Jawa Tengah	99,64
21	Prov. Jawa Barat	99,61
22	Prov. Jambi	99,60
23	Prov. Lampung	99,44
	INDONESIA	99,41
24	Prov. Bengkulu	99,34
25	Prov. Maluku	99,31
26	Prov. Aceh	99,26
27	Prov. Nusa Tenggara Timur	99,19
28	Prov. Papua	99,12
29	Prov. Maluku Utara	99,10
30	Prov. Kalimantan Barat	98,93
31	Prov. Sulawesi Tengah	98,72
32	Prov. Banten	98,66
33	Prov. Sulawesi Utara	98,63
34	Prov. Papua Barat	98,44
35	Prov. Papua Pegunungan	98,44
36	Prov. Sulawesi Tenggara	98,41
37	Prov. Kepulauan Riau	98,18

No	Provinsi	Persentase SMA terakreditasi (%)
38	Prov. Nusa Tenggara Barat	97,62
39	Prov. Papua Barat Daya	93,83

Sumber : diolah dari <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/snpmb/>

2) Persentase SMK Negeri Terakreditasi

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Pada tahun 2025 ini indikator Persentase SMK Negeri terakreditasi ditargetkan 90,07%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 99,14% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator kinerja telah melebihi target yang ada di dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja Persentase SMK Negeri terakreditasi di tahun 2025 ditargetkan 99,14% terealisasi 98,29% dengan tingkat capaian 99,14% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.20. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase SMK Negeri terakreditasi	99,14	98,29	99,14	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

Realisasi indikator kinerja ini diperoleh melalui perhitungan/rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SMK Negeri terakreditasi}}{\text{Jumlah SMK Negeri secara total}} \times 100\% = \frac{115}{117} \times 100\% = 98,29\%$$

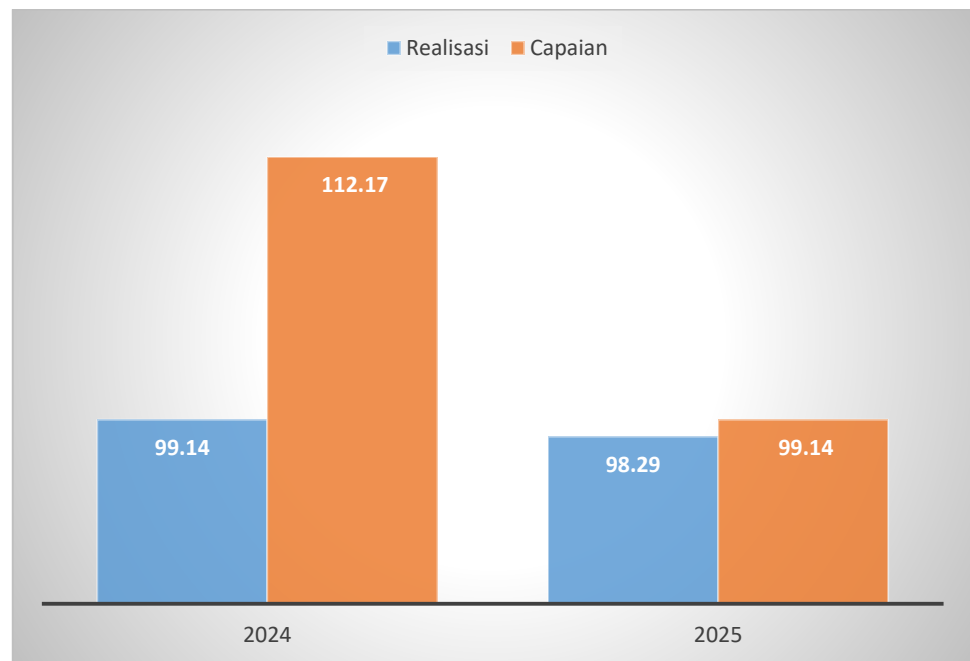
Persentase SMK Negeri terakreditasi dihitung dari Jumlah SMK Negeri terakreditasi sebanyak 115 sekolah dibagi dengan Jumlah seluruh SMK Negeri sebanyak 117 sekolah, maka didapatkan persentase sebesar 98,29%. Adapun angka jumlah SMK Negeri terakreditasi diperoleh melalui Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Persentase SMK Negeri terakreditasi sebesar 99,14% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 13,03% di tahun 2025. Secara absolut nilai Persentase SMK Negeri terakreditasi tahun 2025 hanya mengalami sedikit penurunan 0,85 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya Unit Sekolah Baru yang terbangun sehingga status sekolah masih belum terakreditasi. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.9. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Persentase SMK Negeri terakreditasi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 91,75%. Sementara realisasi tahun 2025 adalah 98,29% menunjukkan pencapaian sebesar 107,13% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

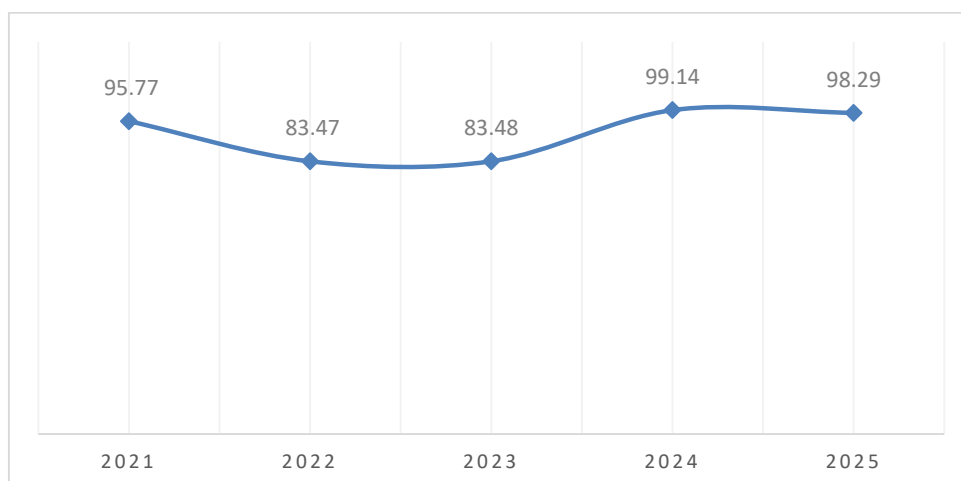
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase SMK Negeri terakreditasi	91,75	98,29	107,13

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase SMK Negeri terakreditasi mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 99,14%. Perkembangan Persentase SMK Negeri terakreditasi tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.10. Perkembangan Persentase SMK Negeri terakreditasi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Persentase SMK Terakreditasi di Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 100% serta

menempati peringkat ke-3 secara nasional, setelah Provinsi D.I Yogyakarta. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.22. Persentase SMK Terakreditasi Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Persentase SMK terakreditasi (%)
1	Prov. Jawa Tengah	100,00
2	Prov. D.I. Yogyakarta	100,00
3	Prov. Sumatera Barat	100,00
4	Prov. Kalimantan Barat	100,00
5	Prov. Kalimantan Selatan	100,00
6	Prov. Kalimantan Timur	100,00
7	Prov. Maluku	100,00
8	Prov. Bali	100,00
9	Prov. Papua	100,00
10	Prov. Bengkulu	100,00
11	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	100,00
12	Prov. Papua Barat	100,00
13	Prov. Kalimantan Utara	100,00
14	Luar Negeri	100,00
15	Prov. Papua Tengah	100,00
16	Prov. Papua Selatan	100,00
17	Prov. Jawa Barat	99,89
18	Prov. D.K.I. Jakarta	99,82
19	Prov. Jawa Timur	99,81
20	Prov. Lampung	99,58
	INDONESIA	99,54
21	Prov. Aceh	99,54
22	Prov. Sumatera Utara	99,45
23	Prov. Jambi	99,44
24	Prov. Riau	99,34
25	Prov. Sumatera Selatan	99,33
26	Prov. Kalimantan Tengah	99,28
27	Prov. Nusa Tenggara Barat	99,09
28	Prov. Sulawesi Selatan	98,96
29	Prov. Kepulauan Riau	98,89
30	Prov. Sulawesi Tengah	98,88
31	Prov. Sulawesi Tenggara	98,73
32	Prov. Maluku Utara	98,63
33	Prov. Sulawesi Barat	98,35
34	Prov. Sulawesi Utara	98,32
35	Prov. Banten	98,32

No	Provinsi	Persentase SMK terakreditasi (%)
36	Prov. Gorontalo	98,31
37	Prov. Nusa Tenggara Timur	97,99
38	Prov. Papua Barat Daya	97,22
39	Prov. Papua Pegunungan	95,45

Sumber : diolah dari <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/snpmb/>

3) Persentase SLB Negeri Terakreditasi

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Pada tahun 2025 ini indikator Persentase SLB Negeri terakreditasi ditargetkan 58,34%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 93,33% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator kinerja telah melebihi target yang ada di dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja Persentase SLB Negeri terakreditasi di tahun 2025 ditargetkan 93,33% terealisasi 87,88% dengan tingkat capaian 94,16% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.23. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase SLB Negeri terakreditasi	93,33	87,88	94,16	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

Realisasi indikator kinerja ini diperoleh melalui perhitungan/rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SLB Negeri terakreditasi}}{\text{Jumlah SLB Negeri secara total}} \times 100\% = \frac{29}{33} \times 100\% = 87,88\%$$

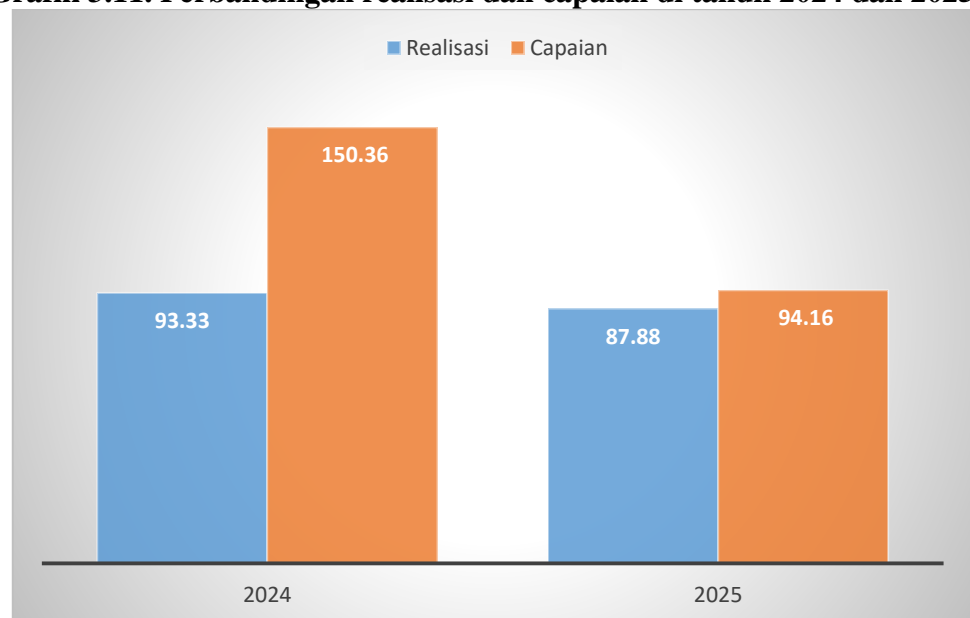
Persentase SLB Negeri terakreditasi dihitung dari Jumlah SLB Negeri terakreditasi sebanyak 29 sekolah dibagi dengan Jumlah seluruh SLB Negeri sebanyak 33 sekolah, maka didapatlah persentase sebesar 87,88%.

Adapaun angka jumlah SLB Negeri terakreditasi diperoleh melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Persentase SLB Negeri terakreditasi sebesar 94,16% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 56,20% di tahun 2025. Namun, secara absolut nilai realisasi Persentase SLB Negeri terakreditasi tahun 2025 hanya mengalami penurunan sebesar 5,45 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya Unit Sekolah Baru SLB Negeri yang terbangun sehingga status sekolah masih belum terakreditasi. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.11. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Persentase SLB Negeri terakreditasi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 60%. Sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 87,88% menunjukkan pencapaian sebesar 146,46% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

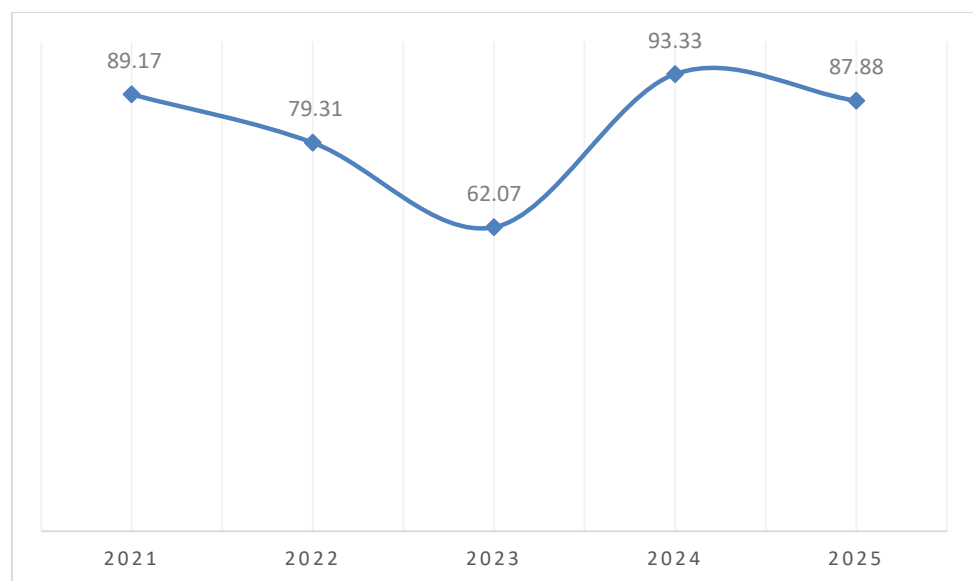
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase SLB Negeri terakreditasi	60	87,88	146,46

Sumber : diolah dari data BAN-PDM

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase SLB Negeri terakreditasi mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 93,33%. Perkembangan Persentase SLB Negeri terakreditasi tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.12. Perkembangan Persentase SLB Negeri terakreditasi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator Persentase SLB Terakreditasi di Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 95,73% serta menempati peringkat ke-29 secara nasional, setelah Provinsi Jambi. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 3.25. Persentase SLB Terakreditasi Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Persentase SLB terakreditasi (%)
1	Prov. D.K.I. Jakarta	100,00
2	Prov. Jawa Tengah	100,00
3	Prov. Aceh	100,00
4	Prov. Sumatera Selatan	100,00
5	Prov. Kalimantan Selatan	100,00
6	Prov. Sulawesi Tengah	100,00
7	Prov. Maluku	100,00
8	Prov. Papua	100,00
9	Prov. Bengkulu	100,00
10	Prov. Gorontalo	100,00
11	Prov. Papua Barat	100,00
12	Prov. Kalimantan Utara	100,00
13	Prov. Papua Tengah	100,00
14	Prov. Papua Selatan	100,00
15	Prov. Papua Barat Daya	100,00
16	Prov. Jawa Barat	98,96
17	Prov. Jawa Timur	98,93
18	Prov. D.I. Yogyakarta	98,75
19	Prov. Sulawesi Tenggara	98,67
20	Prov. Banten	98,23
21	Prov. Riau	98,00
	INDONESIA	97,81
22	Prov. Kalimantan Timur	97,14
23	Prov. Sulawesi Utara	97,06
24	Prov. Lampung	96,77
25	Prov. Sumatera Utara	96,67
26	Prov. Sulawesi Selatan	96,55
27	Prov. Nusa Tenggara Barat	96,00
28	Prov. Jambi	95,83
29	Prov. Sumatera Barat	95,73
30	Prov. Sulawesi Barat	95,65

No	Provinsi	Persentase SLB terakreditasi (%)
31	Prov. Kepulauan Riau	95,45
32	Prov. Bali	93,75
33	Prov. Nusa Tenggara Timur	93,33
34	Prov. Kalimantan Barat	92,31
35	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	90,00
36	Prov. Maluku Utara	88,89
37	Prov. Kalimantan Tengah	80,65

Sumber : diolah dari <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/snpmb/>

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan ketiga indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, salah satunya melalui program revitalisasi sarana/prasarana pendidikan
- b) Memfasilitasi persiapan akreditasi
- c) Pemberdayaan kepala sekolah dan inovasi pendidikan
- d) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan Persentase SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri terakreditasi antara lain:

- a) Keterbatasan anggaran sehingga masih adanya sekolah negeri yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai (laboratorium, perpustakaan, ruang kelas layak, dsb), sehingga sulit memenuhi standar penilaian akreditasi,
- b) Sertifikat akreditasi berlaku dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga sekolah tidak bisa dinilai ulang lebih cepat meski sudah perbaikan mutu, dan
- c) Hambatan kuota visitasi sehingga sekolah negeri kesulitan naik peringkat akreditasi

Untuk meningkatkan Persentase SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri terakreditasi di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan akan mengupayakan untuk:

- a) Penguatan pembinaan akreditasi sekolah

- b) Pengadaan dan rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung
- c) Pelatihan manajemen sekolah, supervisi akademik, dan peningkatan mutu pembelajaran
- d) Penguatan koordinasi dengan BAN-PDM dan pemangku kepentingan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Pengawas Sekolah yang tersebar di masing-masing Cabang Dinas Wilayah 1-8. Pengawas Sekolah memiliki peran dalam pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan sekolah agar memenuhi standar akreditasi.

- b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diwujudkan melalui peningkatan validitas penginputan data sarana dan prasarana sekolah pada sistem Dapodik, sehingga perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sarpras dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

- c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebesar Rp.105.103.690.600,- terealisasi sebesar Rp.99.620.499.197,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 94,78%. Sisa anggaran sebesar Rp.5.483.191.403,- (5,22%) berasal dari waktu pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan tidak mencukupi, efisiensi makan minum kegiatan, makan minum rapat, kegiatan narasumber, moderator dan pembawa acara internal (50%) serta kegiatan *launching* silat tradisi tidak terlaksana karena bencana banjir.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus 97,22%

dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 56,09%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Tingkat Efisiensi} &= \\
 &= \frac{(\textit{Pagu Anggaran} \times \textit{Capaian Kinerja}) - \textit{Realisasi Anggaran}}{\textit{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\textit{Rp } 105.103.690.600 \times 97,22\%) - \textit{Rp } 99.620.499.197}{\textit{Rp } 105.103.690.600} \times 100\% \\
 &= \frac{\textit{Rp } 2.561.308.804}{\textit{Rp } 105.103.690.600} \times 100\% = \mathbf{0,02}
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\textit{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{0,02}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= \mathbf{56,09\%}
 \end{aligned}$$

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp.105.103.690.600,- berada pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan 3 kegiatan yaitu: (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, (2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan (3) Pengelolaan Pendidikan Khusus dan dengan total 34 sub kegiatan. Masing-masing sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
						Target		Realisasi			
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	ruang	1	ruang	113.308.678	111.429.000
				2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	ruang	2	ruang	309.639.000	304.342.371
				3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	ruang	1	ruang	104.691.322	103.989.000
				4	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3	ruang	3	ruang	600.000.000	582444275
				5	Pembangunan Fasilitas Parkir	3	unit	3	unit	450.000.000	447.689.938
				6	Pembangunan Kantin Sekolah	1	unit	1	unit	122.556.000	122.556.000
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	ruang	1	ruang	200.000.000	193.834.394

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
				8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2	ruang	2	ruang	300.000.000	284.434.011
				9	Pengadaan Mebel Sekolah	62	paket	62	paket	7.822.174.751	7.373.520.462
				10	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1	paket	1	paket	100.000.000	90.742.200
				11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	34	paket	33	paket	10.433.311.023	9.387.972.164
				12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30	orang	30	orang	25.285.000	18.612.000
				13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5	dokumen	5	dokumen	642.396.000	531.131.200

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
						Target		Realisasi			
	2. Persentase SMK Negeri terakreditasi			14	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1	unit	1	unit	200.000.000	194.159.421
				15	Pembangunan Ruang Laboratorium	20	ruang	20	ruang	2.642.033.416	2.637.494.273
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	1	ruang	1	ruang	180.000.000	179.157.300
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	4	ruang	4	ruang	1.104.641.618	1.104.641.436
				2	Pembangunan Ruang Laboratorium	14	ruang	14	ruang	2.316.234.427	2.316.234.427
				3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	ruang	4	ruang	287.846.830	287.846.830
				4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	ruang	1	ruang	203.840.043	203.840.043
				5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1	ruang	1	ruang	400.000.000	379.596.284

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
				6	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	ruang	1	ruang	102.111.019	102.111.019
				7	Pengadaan Mebel Sekolah	24	paket	24	paket	5.493.781.332	5.192.457.423
				8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	2	paket	2	paket	300.000.000	96.583.500
				9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	29	paket	27	paket	64.431.105.889	61.663.225.521
				10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	175	orang	175	orang	26.827.508	23.140.000
				11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	dokumen	1	dokumen	250.400.000	178.212.657

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
				12	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	2	ruang	2	ruang	400.000.000	388.092.629
				13	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1	ruang	1	ruang	146.037.206	146.037.206
	3. Persentase SLB Negeri terakreditasi		3. Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Pengadaan Mebel Sekolah	1	paket	1	paket	200.000.000	191.376.814
	2		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	57	paket	56	paket	4.927.321.938	4.562.651.499		
	3		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	29	satuan pendidikan	29	satuan pendidikan	41.320.000	34.148.000		
	4		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	344	orang	344	orang	26.827.500	13.500.000		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
						Target		Realisasi			
				5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	dokumen	2	dokumen	200.000.100	173.295.900
									TOTAL	105.103.690.600	99.620.499.197

3. Sasaran 3: Meningkatnya Kompetensi dan Karakter Peserta Didik

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum, dan (2) Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum.

Pelaksanaan kedua indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang sama, yang secara substansi dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, anggaran pendukung tidak dapat dibagi atau dipisahkan secara spesifik untuk masing-masing indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena satu sub kegiatan yang didanai memberikan kontribusi secara bersamaan terhadap pencapaian kedua indikator tersebut. Dengan demikian, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan di akhir setelah analisis capaian kedua indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik tergambar pada tabel.

Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	76,08	73,56	96,69
Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	62,48	64,27	102,87
Rata-rata Capaian			99,78

Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026
No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

Sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan **rata-rata capaian 99,78%**, termasuk kategori **“Sangat Tinggi”**. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik adalah sebagai berikut.

1) **Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum**

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Pada tahun 2025 ini indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum ditargetkan 59,13%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 76,08% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator kinerja telah melebihi target yang ada di dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.28. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	76,08	73,56	96,69	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

Indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum di tahun 2025 ditargetkan 76,08% terealisasi 73,56% dengan tingkat capaian 96,69% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum diperoleh dari **Rapor Pendidikan**, berikut uraiannya:

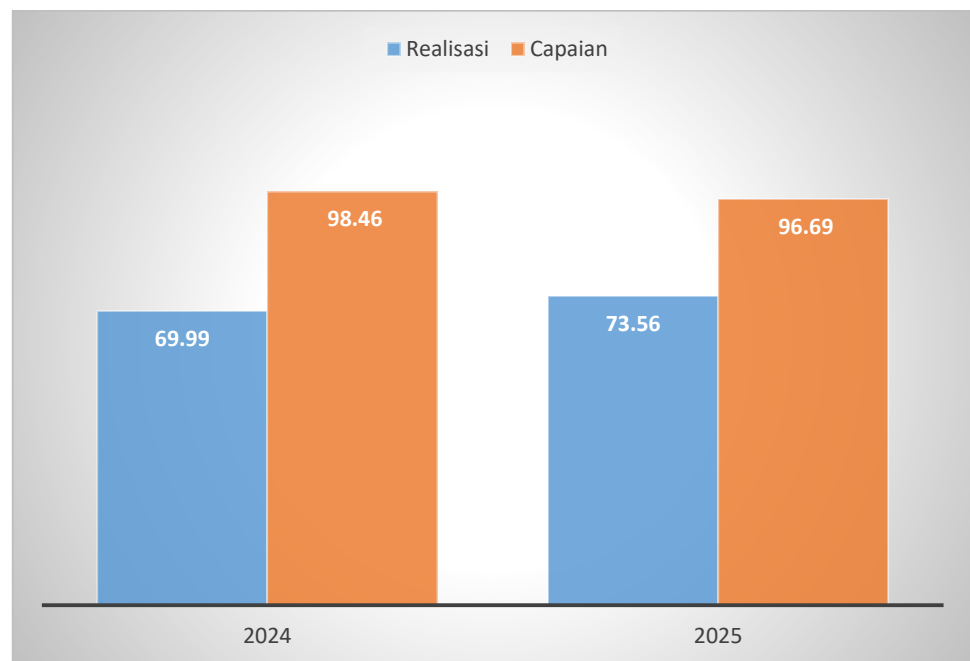
Jenjang	Capaian 2025
SMA	73,68
SMK	67,25
SDLB	72,3
SMPLB	83,3
SMALB	71,29
Rata-rata Skor Kemampuan Literasi	73,56

Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum sebesar 96,69%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini hanya menunjukkan sedikit penurunan 1,77% di tahun 2025. Namun, secara absolut persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2025 meningkat 3,58 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.13. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 59,45%. Sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 73,56% menunjukkan pencapaian sebesar 123,74% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan Dinas Pendidikan

telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	59,45	73,56	123,74

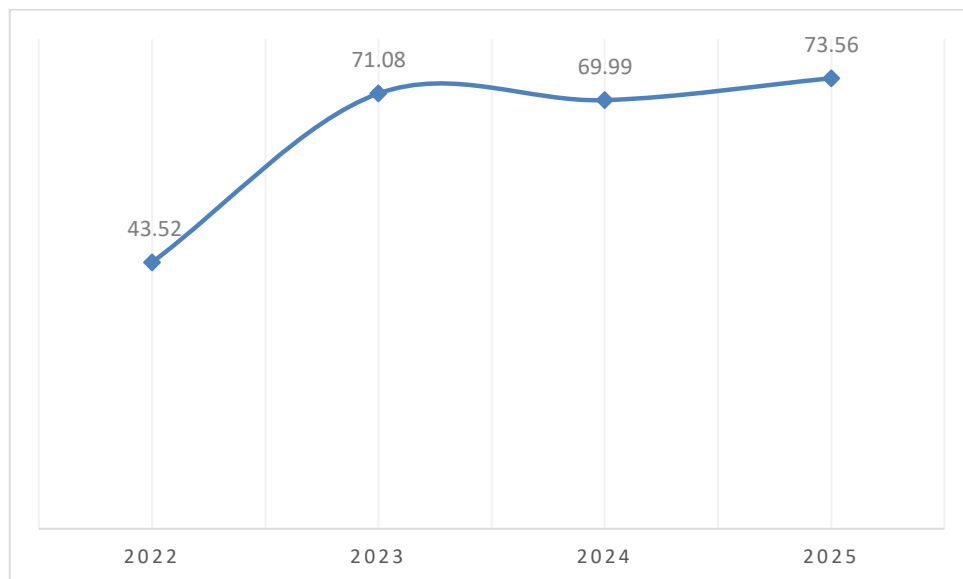
Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 3 tahun terakhir

Indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum dihitung berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang dilaksanakan melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen Nasional (AN) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional, namun hasilnya baru tersedia pada tahun 2022. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat dihitung mulai tahun 2022.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 73,56%. Perkembangan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2022-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.14. Perkembangan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum di Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 73,56 serta menempati peringkat ke-7 secara nasional, setelah Provinsi Jawa Tengah. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.30. Skor Kemampuan Literasi Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Skor Kemampuan Literasi 2025
1	Kalimantan Timur	79,92
2	Bali	77,29
3	DI Yogyakarta	76,66
4	Kepulauan Bangka Belitung	75,42
5	Kalimantan Selatan	74,83
6	Jawa Tengah	73,98
7	Sumatera Barat	73,56
8	Kalimantan Utara	73,33
9	Jawa Timur	72,74
10	Jawa Barat	70,91
11	Kalimantan Tengah	70,6
12	Riau	70,5
13	Aceh	70,31

No	Provinsi	Skor Kemampuan Literasi 2025
14	Sulawesi Tengah	69,94
15	Lampung	68,77
16	Jambi	67,23
17	Banten	66,93
18	Sulawesi Barat	66,26
19	DKI Jakarta	65,26
20	Sulawesi Tenggara	65,22
21	Sulawesi Selatan	64,97
22	Kepulauan Riau	63,6
23	Sumatera Utara	63,49
24	Sulawesi Utara	63,07
25	Sumatera Selatan	62,85
26	Kalimantan Barat	61,93
	INDONESIA	69,60
27	Bengkulu	60,67
28	Gorontalo	60,63
29	Nusa Tenggara Barat	59,94
30	Maluku Utara	56,37
31	Maluku	55,7
32	Nusa Tenggara Timur	55,23
33	Papua Barat Daya	42,62
34	Papua	41,41
35	Papua Tengah	34,67
36	Papua Selatan	28,51
37	Papua Barat	16,97
38	Papua Pengunungan	0

Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026
No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal Minangkabau
- Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pelatihan/workshop terkait pembelajaran literasi berupa menulis berita dan sastra
- Peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, serta operator dapodik melalui pelatihan/workshop untuk transformasi pembelajaran digital

Hambatan/permasalahan dalam untuk meningkatkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum antara lain:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan sumber belajar literasi secara merata, terutama di satuan pendidikan dengan keterbatasan sarana
- b) Variasi kemampuan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran literasi yang efektif
- c) Rendahnya motivasi peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dukungan keluarga

Untuk meningkatkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Penguatan program literasi sekolah dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran
- b) Peningkatan pendampingan dan supervisi akademik bagi pendidik
- c) Penguatan kolaborasi dengan orang tua dan pemangku kepentingan untuk menumbuhkan budaya literasi

2) Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Pada tahun 2025 ini indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum ditargetkan 28,32%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 62,48% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator kinerja telah melebihi target yang ada di dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.31. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	62,48	64,27	102,87	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

Indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum di tahun 2025 ditargetkan 62,48% terealisasi 64,27% dengan tingkat capaian 102,87% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum diperoleh dari **Rapor Pendidikan**, berikut uraiannya:

Jenjang	Capaian 2025
SMA	66,25
SMK	60,26
SDLB	61,46
SMPLB	56,17
SMALB	77,22
Rata-rata Skor Kemampuan Numerasi	64,27

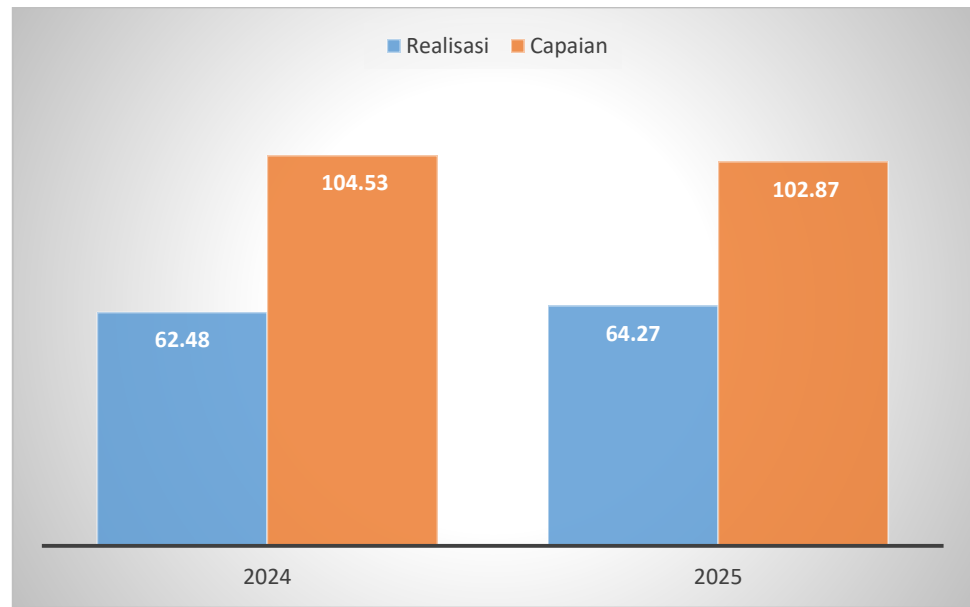
Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum sebesar 102,87% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini hanya menunjukkan sedikit penurunan 1,66% di tahun 2025. Namun, secara absolut persentase siswa

dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2025 meningkat 1,80 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.15. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Target tahun terakhir indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 28,63%. Sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 64,27% menunjukkan pencapaian sebesar 224,49% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.32. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	28,63	64,27	224,49

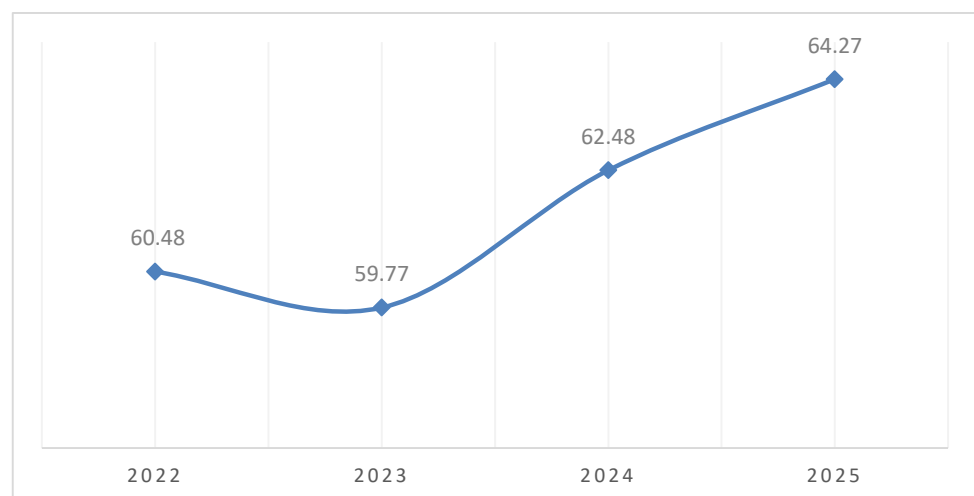
Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 3 tahun terakhir

Indikator kinerja persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum dihitung berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang dilaksanakan melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen Nasional (AN) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional, namun hasilnya baru tersedia pada tahun 2022. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat dihitung mulai tahun 2022.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 64,27%. Perkembangan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2022-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.16. Perkembangan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum di Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 64,27 serta menempati peringkat ke-8 secara nasional, setelah Provinsi Jawa Timur. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.33. Skor Kemampuan Numerasi Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Skor Kemampuan Numerasi 2025
1	Kalimantan Timur	69,22
2	Bali	67,98
3	Kalimantan Selatan	67,71
4	Jawa Tengah	66,18
5	DI Yogyakarta	66,06
6	Kepulauan Bangka Belitung	65,21
7	Jawa Timur	64,97
8	Sumatera Barat	64,27
9	Kalimantan Utara	62,9
10	Jawa Barat	62,87
11	Aceh	61,33
12	Riau	61,32
13	Lampung	61,04
14	Sulawesi Tengah	59,45
15	Banten	59,31
16	Kalimantan Tengah	59,15
17	Sulawesi Tenggara	58,79
18	DKI Jakarta	58,15
19	Sulawesi Barat	57,96
20	Sulawesi Selatan	57,3
21	Jambi	57,11
22	Sumatera Utara	56,82
23	Sulawesi Utara	56,59
24	Kepulauan riau	56,38
25	Sumatera Selatan	55,99
26	Kalimantan Barat	54,3
27	Gorontalo	54,06
	INDONESIA	60,83
28	Bengkulu	53,6
29	Nusa Tenggara Barat	53,34
30	Maluku Utara	51,98
31	Maluku	51,53

No	Provinsi	Skor Kemampuan Numerasi 2025
32	Nusa Tenggara Timur	51,42
33	Papua	39,88
34	Papua Barat Daya	33,08
35	Papua Tengah	30,33
36	Papua Selatan	28,41
37	Papua Barat	13,32
38	Papua Pengunungan	0

Sumber : diolah dari lampiran surat Mendikdasmen 2026
No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan asesmen dan evaluasi hasil belajar numerasi secara berkala untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik
- b) Penyediaan sarana pendukung pembelajaran numerasi, termasuk alat peraga dan media pembelajaran
- c) Peningkatan kompetensi pendidik dalam penguasaan materi dan metode pembelajaran numerasi melalui pelatihan dan pendampingan

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum antara lain:

- a) Masih rendahnya kemampuan numerasi sebagian peserta didik
- b) Keterbatasan inovasi pembelajaran numerasi di beberapa satuan pendidikan
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran numerasi

Untuk meningkatkan nilai persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan minat dan pemahaman numerasi peserta didik
- b) Peningkatan kapasitas pendidik dalam merancang pembelajaran numerasi yang menarik dan aplikatif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

a) Sumber daya manusia yang kompeten

Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki dukungan sumber daya manusia sebanyak 30 orang pegawai pada Bidang Pembinaan SMA–SLB dan 17 orang pegawai pada Bidang Pembinaan SMK. Seluruh pegawai tersebut diberdayakan secara optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran kinerja yaitu meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik.

b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan secara daring, antara lain dengan memanfaatkan aplikasi Zoom untuk rapat koordinasi pendidikan dengan satuan pendidikan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan karakter peserta didik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi penggunaan sarana prasarana sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan yang meniadakan pelaksanaan kegiatan di hotel.

c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik adalah sebesar Rp.28.428.394.000,- terealisasi sebesar Rp.24.314.175.366,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 85,53%. Sisa anggaran sebesar Rp.4.114.218.634,- (14,47%) berasal dari efisiensi kegiatan berupa perjalanan dinas dan makan minum aktivitas lapangan, efisiensi pembayaran honor narasumber, moderator dan pembawa acara internal (50%), efisiensi pembayaran honorarium juri lomba karena kebijakan Kemendikdasmen perihal penggabungan lomba jenjang SMK dan SMA (FLS3N dan O2SN), pengadaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik SMK tidak

dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, serta kegiatan UPTD Balai TIK pengelolaan pendidikan SMA, SMK, dan SLB didukung oleh mitra dalam hal sharing cost untuk makan minum kegiatan dan narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik 99,78% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 85,63%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{**Tingkat Efisiensi**} &= \\
 &= \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\text{Rp } 28.428.394.000 \times 99,78\%) - \text{Rp } 24.314.175.366}{\text{Rp } 28.428.394.000} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 4.051.676.167}{\text{Rp } 28.428.394.000} \times 100\% = \mathbf{0,14}
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{0,14}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= \mathbf{85,63\%}
 \end{aligned}$$

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp.28.428.394.000,- yang mendukung capaian sasaran meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik berada pada 3 program dengan masing-masing kegiatan yaitu:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan total 14 sub kegiatan

- b) Program Pengembangan Kurikulum, kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- c) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, kegiatan: Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan total 2 sub kegiatan

Masing-masing sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.34. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran 3: Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume		Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target	Realisasi				
Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	1 Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	40.001	peserta didik	40.001	peserta didik	16.385.878.000	14.991.191.957
				2 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	6.250	buku	6.250	buku	4.966.800.000	4.946.339.400
				3 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	orang	60	orang	22.695.000	14.928.000
	4 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			5	konten digital	5	konten digital	23.610.000	6.375.000	
	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi									

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
	kompetensi minimum			5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20	orang	60	orang	22.695.000	6.390.000	
			2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.069	peserta didik	9.069	peserta didik	4.439.670.000	3.815.107.109
				2	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	11.437	buku	-	buku	1.900.000.000	2.860.000	
				3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	orang	50	orang	12.500.000	8.637.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
				4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5	konten digital	5	konten digital	13.110.000	6.070.000	
				5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20	orang	50	orang	12.500.000	3.390.000	
			3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	910	peserta didik	910	peserta didik	500.000.000	449.416.400
				2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	orang	50	orang	9.380.000	7.756.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
						Target		Realisasi					
				3	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5	konten digital	5	konten digital	9.380.000	5.338.000		
				4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15	orang	50	orang	9.380.000	4.755.000		
		2	Program Pengembangan Kurikulum	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	40	orang	40	orang	81.227.000	31.840.000
		3	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1	Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa	1	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah	23	orang	23	orang	12.769.000	9.007.500

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
			dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kewenangan Provinsi						
				2 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	38	peserta didik	38	peserta didik	6.800.000	4.774.000
								TOTAL	28.428.394.000	24.314.175.366

4. Sasaran 4: Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Dinas Pendidikan menetapkan sasaran strategis Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai dalam upaya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan pendidikan lanjutan sesuai dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui empat indikator kinerja yaitu: (1) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah, (2) Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi, (3) Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri, dan (4) Jumlah SMK yang terevitalisasi.

Pelaksanaan keempat indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang sama, yang secara substansi dirancang untuk meningkatkan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, anggaran pendukung tidak dapat dibagi atau dipisahkan secara spesifik untuk masing-masing indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena satu sub kegiatan yang didanai memberikan kontribusi secara bersamaan terhadap pencapaian kedua indikator tersebut. Dengan demikian, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan di akhir setelah analisis capaian keempat indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus tergambar pada tabel.

Tabel 3.35. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,98	89,10	108,69
Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,93	29,85	43,95
Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	54,14	32,42	59,88
Jumlah SMK yang terevitalisasi	52	51	98,08
Rata-rata Capaian			77,65

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Sasaran meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diukur dengan menggunakan 4 indikator di atas tercapai dengan **rata-rata capaian 77,65%**, termasuk kategori **“Tinggi”**. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

1) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah ditargetkan 35%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 81,98% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah di tahun 2025 ditargetkan 81,98% terealisasi 89,10% dengan tingkat capaian 108,69% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.36. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,98	89,10	108,69	Sangat Tinggi

Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah tidak dihitung menggunakan rumus perhitungan, akan tetapi diperoleh dari Hasil Capaian **Rapor Pendidikan**.

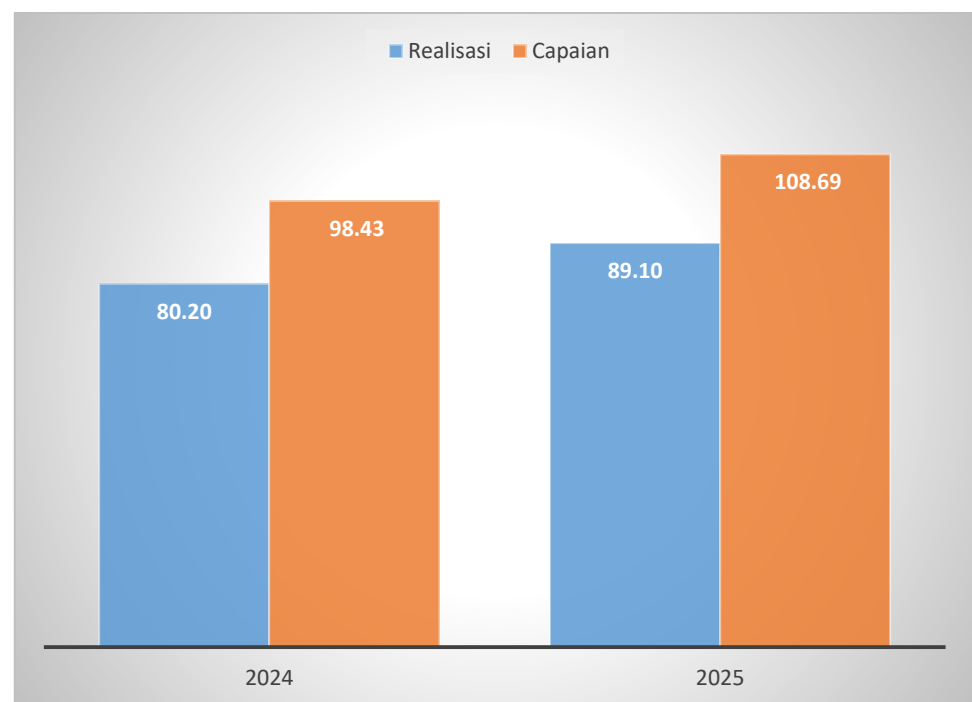
Indikator	Jenjang	Capaian 2025
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	SMK	89,1

Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026
No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah sebesar 108,69%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan kenaikan 10,26% di tahun 2025. Dan secara absolut persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah tahun 2025 juga meningkat 8,90 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.17. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 40%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 89,10% menunjukkan pencapaian sebesar 222,75% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

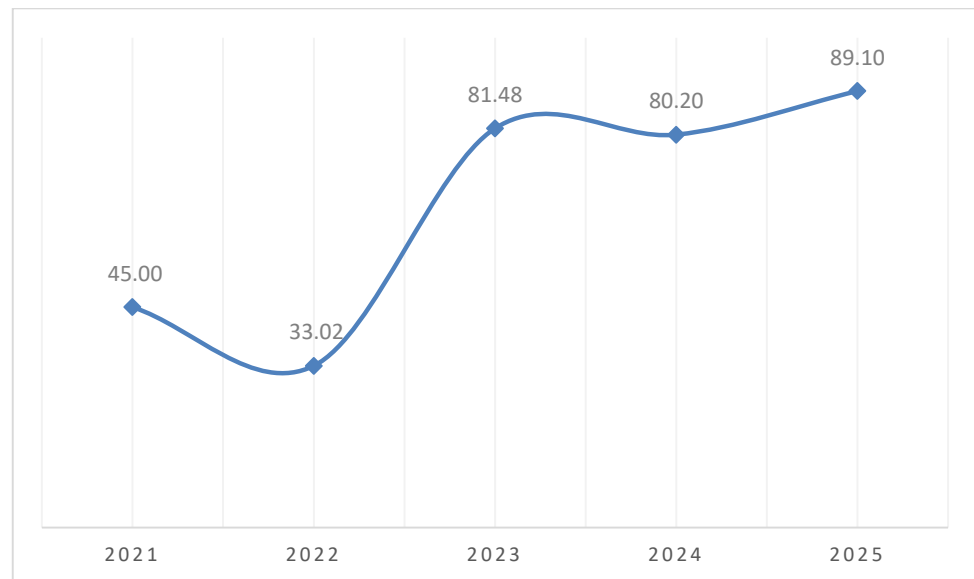
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	40	89,10	222,75

Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026 No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 89,10%. Perkembangan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.18. Perkembangan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi indikator persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah di Provinsi Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional sebesar 64,27 serta menempati peringkat ke-8 secara nasional, setelah Provinsi Jawa Timur. Adapun persentase capaian secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.38. Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah Tiap Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 2025
1	Bali	95,12
2	DI Yogyakarta	93,02
3	Kalimantan Timur	92,18
4	Aceh	92,04
5	Kalimantan Utara	91,79
6	DKI Jakarta	91,62
7	Jawa Timur	91,46
8	Kepulauan Bangka Belitung	90,78
9	Jawa Tengah	90,55
10	Riau	89,79
11	Kalimantan Selatan	89,62

No	Provinsi	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 2025
12	Sumatera Barat	89,1
13	Kalimantan Barat	89,1
14	Gorontalo	87,69
15	Jambi	86,86
16	Jawa Barat	86,75
17	Nusa Tenggara Barat	86,71
18	Lampung	85,51
19	Sulawesi Tenggara	85,37
20	Banten	85,17
21	Kepulauan riau	83,42
22	Sulawesi Selatan	83,26
23	Sumatera Selatan	82,81
24	Bengkulu	77,93
25	Sulawesi Utara	77,69
26	Sulawesi Tengah	75,59
27	Sulawesi Barat	75,39
28	Maluku Utara	71,02
	INDONESIA	86,33
29	Kalimantan Tengah	67,21
30	Sumatera Utara	62,15
31	Maluku	59,93
32	Nusa Tenggara Timur	59,29
33	Papua Barat Daya	0
34	Papua Pengunungan	0
35	Papua Tengah	0
36	Papua Selatan	0
37	Papua Barat	0
38	Papua	0

Sumber : diperoleh dari lampiran surat Mendikdasmen 2026
No.3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) guna meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja

- b) Penguatan kerja sama antara SMK dengan DUDI melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan, magang industri, dan keterlibatan industri dalam proses pembelajaran

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah antara lain:

- d) Keterbatasan daya serap dunia kerja terhadap lulusan pendidikan vokasi, karena masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan
- e) Belum meratanya kualitas dan intensitas kemitraan antara SMK dan DUDI
- f) Belum optimalnya jumlah SMK unggul berbasis potensi daerah

Untuk meningkatkan nilai persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Penajaman kurikulum dan program pembelajaran berbasis kebutuhan industri serta potensi unggulan daerah
- b) Penguatan dan perluasan kemitraan strategis dengan DUDI untuk meningkatkan peluang penyerapan lulusan

2) Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi

- a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi ditargetkan 39%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 67,93% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi di tahun 2025 ditargetkan 67,93% terealisasi 29,85% dengan tingkat capaian 43,95% termasuk kategori keberhasilan Sangat Rendah.

Tabel 3.39. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,93	29,85	43,95	Sangat Rendah

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan menengah yang diterima di Perguruan Tinggi}}{\text{Jumlah siswa lulusan pendidikan menengah keseluruhan}} \times 100\% = \frac{22.809}{76.404} \times 100\% = 29,85\%$$

Jumlah lulusan pendidikan menengah yang diterima di Perguruan Tinggi sebesar 22.809 diperoleh dari lulusan SMA diterima di Perguruan Tinggi sebesar 20.771 dan lulusan SMK diterima di Perguruan Tinggi sebesar 2.038.

Tabel 3.40. Data Dukung Indikator Persentase Lulusan Pendidikan Menengah yang Melanjutkan pada Pendidikan Tinggi

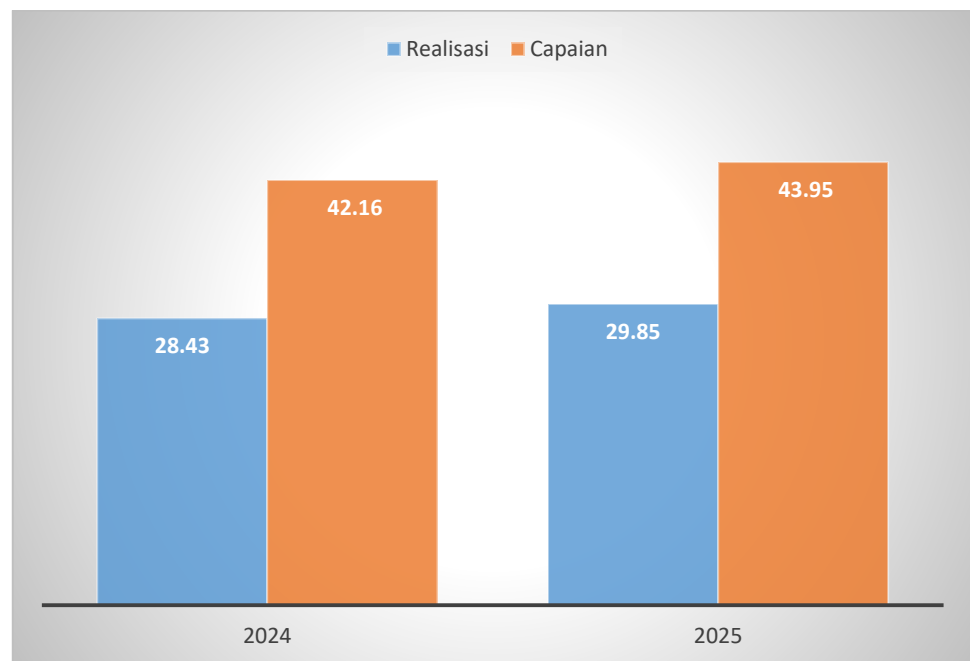
Jenjang	Siswa Lulusan	Siswa Bekerja	Tidak Melanjutkan	Siswa lulus PTN	Siswa lulus PTN dan PTS
SLB	370				
SMA	49.737	7.934	10.568	16.125	20.771
SMK	26.297	19.272			2.038
Total	76.404	27.206	10.938	16.125	22.809

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi sebesar 43,95%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan kenaikan 1,78% di tahun 2025. Dan secara absolut persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 1,42 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.19. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 40%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 29,85% menunjukkan pencapaian sebesar 74,63% dari target tahun terakhir

Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target di tahun 2026.

Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

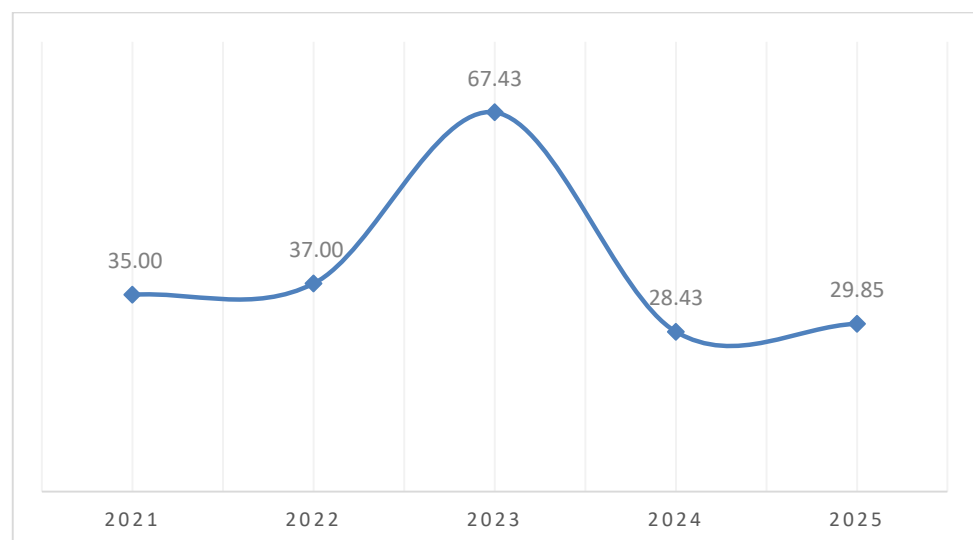
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	40	29,85	74,63

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 67,43%. Perkembangan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.20. Perkembangan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Tes Pengembangan Minat Bakat Siswa (Asesmen Psikotes Potensi Siswa) sebagai persiapan masuk perguruan tinggi berdasarkan potensi siswa
- b) Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi antara lain:

- a) Masih adanya kesadaran dan minat lulusan rendah untuk melanjutkan pada pendidikan tinggi akibat faktor ekonomi dan topografi lingkungan tempat tinggal
- b) Keterbatasan kuota beasiswa dari pemerintah daerah/pusat (KIP kuliah), serta biaya hidup dan kuliah yang tinggi terutama di luar provinsi

Untuk meningkatkan nilai persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Peningkatan intensitas aktifitas yang mendorong minat bakat siswa agar melanjutkan ke pendidikan tinggi
- b) Alokasi anggaran tambahan untuk beasiswa dari pemerintah daerah

3) Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri ditargetkan 55,22%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 54,14% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri di tahun 2025 ditargetkan 54,14% terealisasi 32,42% dengan tingkat capaian 59,88% termasuk kategori keberhasilan Rendah.

Tabel 3.42. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	54,14	32,42	59,88	Rendah

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada perguruan tinggi negeri dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri}}{\text{Jumlah siswa lulusan SMA keseluruhan}} \times 100\% = \frac{16.125}{49.737} \times 100\% = 32,42\%$$

Jumlah lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri sebesar 16.125 dan jumlah siswa lulusan SMA secara keseluruhan adalah sebesar 49.737.

Tabel 3.43. Data Dukung Indikator Persentase Lulusan Pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri

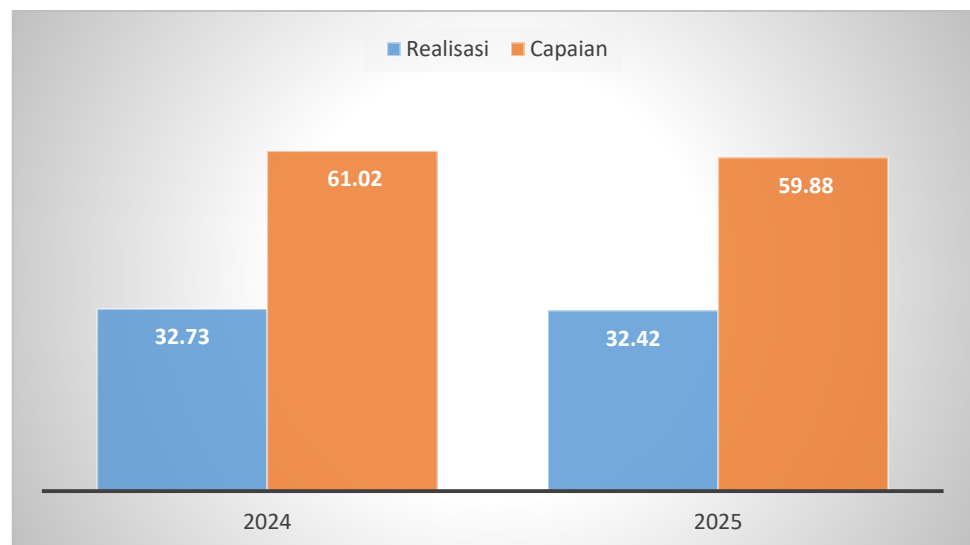
Jenjang	Siswa Lulusan	Siswa Bekerja	Tidak Melanjutkan	Siswa lulus PTN	Siswa lulus PTN dan PTS
SLB	370				
SMA	49.737	7.934	10.568	16.125	20.771
SMK	26.297	19.272			2.038
Total	76.404	27.206	10.938	16.125	22.809

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri sebesar 59,88%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 1,14% di tahun 2025. Dan secara absolut persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri tahun 2025 hanya mengalami sedikit penurunan 0,31 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.21. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 56%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 32,42% menunjukkan pencapaian sebesar 57,89% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

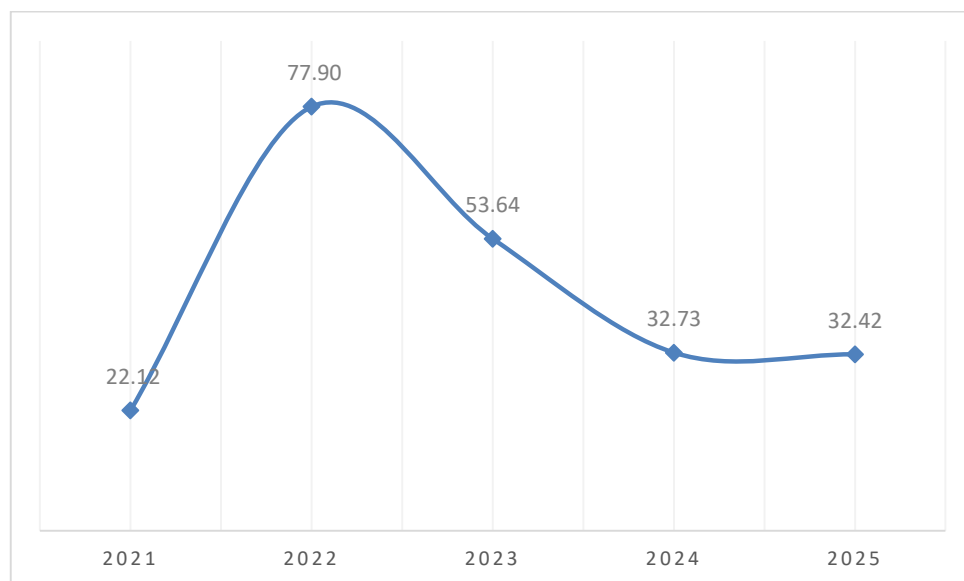
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	56	32,42	57,89

Sumber : diolah dari rekapitulasi data lulusan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri mengalami peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 77,90%. Perkembangan persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.22. Perkembangan persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Tes Pengembangan Minat Bakat Siswa (Asesmen Psikotes Potensi Siswa) sebagai persiapan masuk perguruan tinggi berdasarkan potensi siswa
- b) Adanya program beasiswa Rajawali untuk anak daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan penerima beasiswa berkelanjutan SMA/SMK/SLB sebanyak 350 orang, PTN dalam negeri S1 sebanyak 280 orang, PTN dalam negeri S2 sebanyak 20 orang, dan PTN dalam negeri S3 sebanyak 5 orang

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan meningkatkan persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri antara lain:

- a) Masih adanya kesadaran dan minat lulusan rendah untuk melanjutkan pada pendidikan tinggi akibat faktor ekonomi dan topografi lingkungan tempat tinggal
- b) Keterbatasan kuota beasiswa dari pemerintah daerah/pusat (KIP kuliah), serta biaya hidup dan kuliah yang tinggi terutama di luar provinsi

Untuk meningkatkan nilai persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Peningkatan intensitas aktifitas yang mendorong minat bakat siswa agar melanjutkan ke pendidikan tinggi
- b) Alokasi anggaran tambahan untuk beasiswa dari pemerintah daerah

4) Jumlah SMK yang terevitalisasi

- a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator jumlah SMK yang terevitalisasi ditargetkan 12 unit. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 52 unit berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja jumlah SMK yang terevitalisasi di tahun 2025 ditargetkan 52 unit terealisasi 51 unit dengan tingkat capaian 98,08% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.45. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Jumlah SMK yang terevitalisasi	52	51	98,08	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator jumlah SMK yang terevitalisasi tidak dihitung menggunakan rumus perhitungan, akan tetapi diperoleh melalui hasil seleksi Direktorat SMK pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di bawah ini dapat dilihat daftar nama-nama sekolah SMK yang terevitalisasi pada tahun 2025:

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG	KETERANGAN
1	SMK N 1 Lubuk Basung	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Baru Tahap I Tahun 2024
2	SMKN 1 Lembah Melintang	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Baru Tahap I Tahun 2024
3	SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Baru Tahap I Tahun 2024
4	SMKN 5 Solok Selatan	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Baru Tahap I Tahun 2024
5	SMKN 1 Lintau Buo	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Baru Tahap I Tahun 2024
6	SMKN 1 Enam Lingkung	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
7	SMKN 1 Rao Selatan	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
8	SMKN 1 Koto Xi Tarusan	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
9	SMKN 4 Sijunjung	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
10	SMKN 1 Gunung Talang	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
11	SMKN 1 Batusangkar	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG	KETERANGAN
12	SMKN 1 Solok	Bisnis dan Manajemen	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru Tahap I Tahun 2024
13	SMKN 2 Painan	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
14	SMKN 5 Sijunjung	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
15	SMKN 2 Bukittinggi	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
16	SMKN 4 Padang	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
17	SMKN 8 Padang	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
18	SMKS Semen Padang	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
19	SMKN 1 Sumatera Barat	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
20	SMKN 3 Pariaman	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
21	SMKN 3 Payakumbuh	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Lanjutan Tahap I Tahun 2024
22	SMKN 1 Ampek Angkek	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
23	SMKN 1 Tanjung Raya	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
24	SMKN 1 Tilatang Kamang	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
25	SMKN 1 Koto Baru	Agribisnis dan Agroteknologi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
26	SMKN1 Guguk	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
27	SMKN PP Padang Mengatas	Agribisnis dan Agroteknologi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
28	SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024

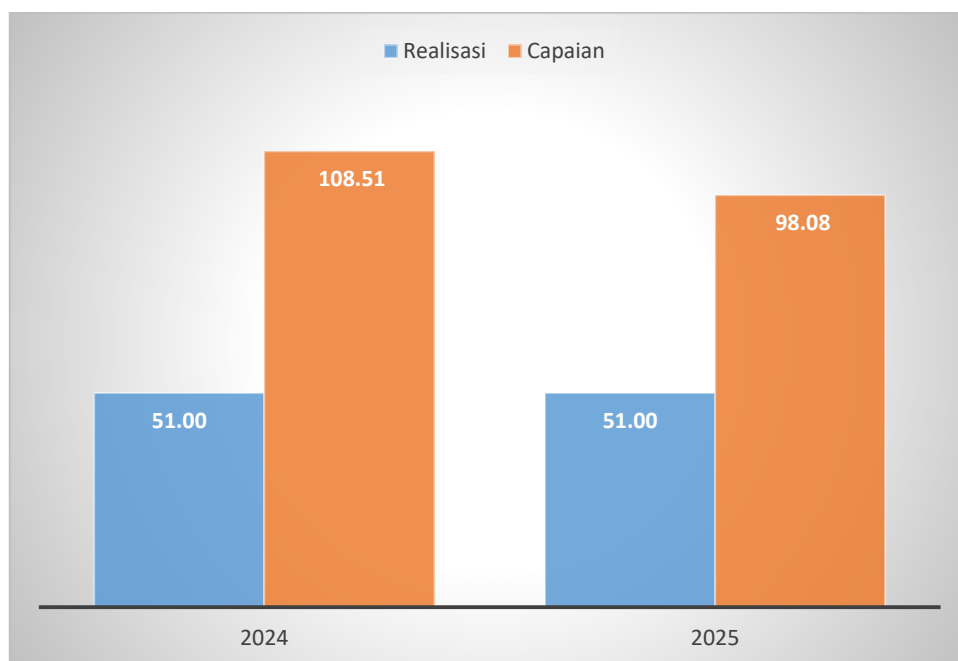
NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG	KETERANGAN
29	SMKN 1 Painan	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
30	SMKN 2 Painan	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
31	SMKS E Adi Karya Linggosari Baganti	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
32	SMKN 5 Sijunjung	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
33	SMKN 1 Batipuh	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
34	SMKS Pembangunan Bukittinggi	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
35	SMKN 1 Sumatera Barat	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
36	SMKN 10 Padang	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
37	SMKN 4 Padang	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
38	SMKN 5 Padang	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
39	SMKN 8 Padang	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
40	SMKS Teknologi Plus Padang	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
41	SMKN 1 Padang Panjang	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
42	SMKN 2 Padang Panjang	Teknologi Informasi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
43	SMKN 3 Pariaman	Kemaritiman	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
44	SMKN 3 Payakumbuh	Seni dan Ekonomi Kreatif	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
45	SMKN 4 Payakumbuh	Teknologi Informasi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG	KETERANGAN
46	SMKN 1 Sawahlunto	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
47	SMKN 2 Sawahlunto	Energi dan Pertambangan	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
48	SMKN 3 Kota Solok	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
49	SMKN 2 Bukittinggi	Pariwisata	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
50	SMKN 2 Batusangkar	Agribisnis dan Agriteknologi	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024
51	SMKS Semen Padang	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap I Tahun 2024

Sumber : rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator jumlah SMK yang terevitalisasi sebesar 98,08%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 10,43% di tahun 2025. Namun, secara absolut jumlah SMK yang terevitalisasi tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini akibat target yang lebih tinggi guna optimalisasi kinerja. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.23. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja jumlah SMK yang terevitalisasi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 16 unit. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 51 unit menunjukkan pencapaian sebesar 318,75% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

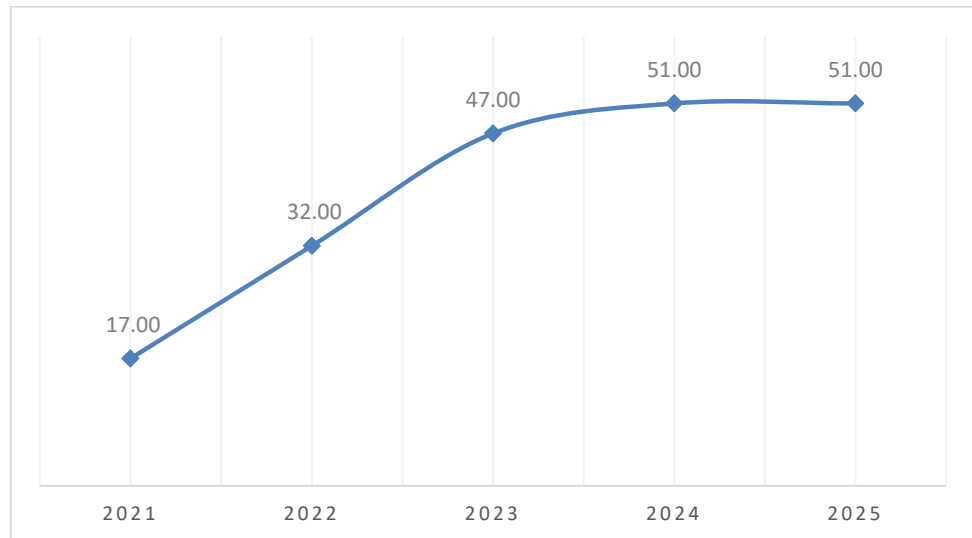
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Jumlah SMK yang terevitalisasi	16	51	318,75

Sumber : diolah dari rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah SMK yang terevitalisasi menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada tahun terakhir tidak mengalami penambahan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 51 unit. Perkembangan jumlah SMK yang terevitalisasi tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.24. Perkembangan jumlah SMK yang terevitalisasi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator jumlah SMK yang terevitalisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan jumlah SMK yang terevitalisasi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan SMK BLUD (SMK Badan Layanan Usaha Daerah) dan SMK PK (SMK Pusat Keunggulan) melalui SK Gubernur untuk adaptasi kurikulum *link and match* dengan topografi Sumatera Barat
- b) Melakukan monitoring revitalisasi SMK

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan jumlah SMK yang terevitalisasi antara lain:

- a) Masih tertinggalnya sarana prasarana laboratorium SMK dibanding standar industri berbasis topografi Sumatera Barat
- b) Kurikulum SMK belum sepenuhnya disesuaikan dengan wilayah topografi Sumatera Barat
- c) Masih sedikitnya guru SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri dari sektor topografi Sumatera Barat

Untuk meningkatkan jumlah SMK yang terevitalisasi di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Memperluas program SMK PK (SMK Pusat Keunggulan)
- b) Mengalokasikan anggaran revitalisasi untuk *upgrade teaching factory*

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi peran pegawai di Bidang Pembinaan SMA–SLB pada seksi peserta didik sebanyak 14 orang dan di Bidang Pembinaan SMK pada seksi peserta didik sebanyak 8 orang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dengan pembagian tugas yang terkoordinasi serta pemanfaatan kompetensi pegawai secara optimal, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

- b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah penggunaan aplikasi e-Ijazah dalam pengumpulan dan pengelolaan data lulusan peserta didik, sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi

c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah sebesar Rp.42.900.988.693,- terealisasi sebesar Rp.33.360.404.969,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 77,76%. Sisa anggaran sebesar Rp.9.540.583.724,- (22,24%) berasal dari belanja BLUD masing-masing satuan pendidikan SMK BLUD yaitu sebanyak 43 unit kerja satuan pendidikan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus 77,65% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 49,72%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{*Tingkat Efisiensi*} &= \\
 &= \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\text{Rp } 42.900.988.693 \times 77,65\%) - \text{Rp } 33.360.404.969}{\text{Rp } 42.900.988.693} \times 100\% \\
 &= \frac{-\text{Rp } 47.787.249}{\text{Rp } 42.900.988.693} \times 100\% = -0,001
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\text{*Tingkat Efisiensi*}}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{-0,001}{20} \times 50 \right) \\
 \text{Nilai Efisiensi} &= 49,72\%
 \end{aligned}$$

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp.42.900.988.693,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Sub kegiatan ini mempunyai 43 output yang tercapai sesuai target

yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.47. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran 4: Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Jumlah SMK yang terevitalisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	43	unit kerja	43	unit kerja	42.900.988.693	33.360.404.969
TOTAL									42.900.988.693	33.360.404.969

5. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan menetapkan meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut ada empat yaitu: (1) Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4, (2) Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri, (3) Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4, dan (4) Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4.

Pelaksanaan keempat indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang sama, yang secara substansi dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, anggaran pendukung tidak dapat dibagi atau dipisahkan secara spesifik untuk masing-masing indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena satu sub kegiatan yang didanai memberikan kontribusi secara bersamaan terhadap pencapaian keempat indikator tersebut. Dengan demikian, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan di akhir setelah analisis capaian keempat indikator kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan tergambar pada tabel.

Tabel 3.48. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	99,64	98,11	98,46
Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	60,93	61,46	100,86
Persentase Guru yang bersertifikasi	65,90	71,88	109,08
Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	95,95	93,72	97,68
Rata-rata Capaian			101,52

Sumber : diolah dari data Dapodik dan rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

Sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur dengan menggunakan 4 indikator di atas tercapai dengan **rata-rata capaian 101,52%**, termasuk kategori “**Sangat Tinggi**”. Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.

1) Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 ditargetkan 99,37%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 99,64% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.49. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	99,64	98,11	98,46	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

Indikator kinerja persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 di tahun 2025 ditargetkan 99,64% terealisasi 98,11% dengan tingkat capaian 98,46% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100\% = \frac{18.586}{18.945} \times 100\% = 98,11\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 dihitung menggunakan rumus Jumlah guru yang berpendidikan minimal S1/D4 sebanyak 18.586 dibagi

Jumlah seluruh guru sebesar 18.945, sehingga didapat persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 adalah 98,11%. Berikut data dukung dalam memperoleh realisasi indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4:

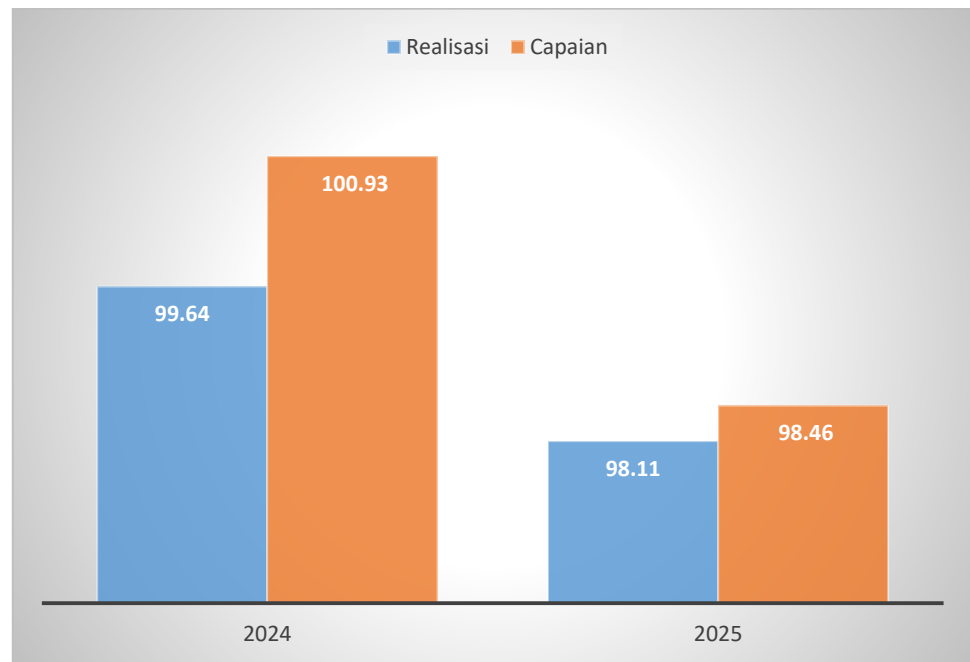
Tabel 3.50. Data Dukung Indikator kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4

Jenjang	Jumlah guru min. S1/D4	Jumlah seluruh guru	%Capaian
SMA	10.343	10.475	98,74
SMK	6.786	6.944	97,72
SLB	1.457	1.526	95,48
TOTAL	18.586	18.945	98,11

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 sebesar 98,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 2,47% di tahun 2025. Namun, secara absolut nilai realisasi tahun 2025 hanya mengalami sedikit penurunan 1,53 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.25. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 100%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 98,11% menunjukkan pencapaian sebesar 98,11% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

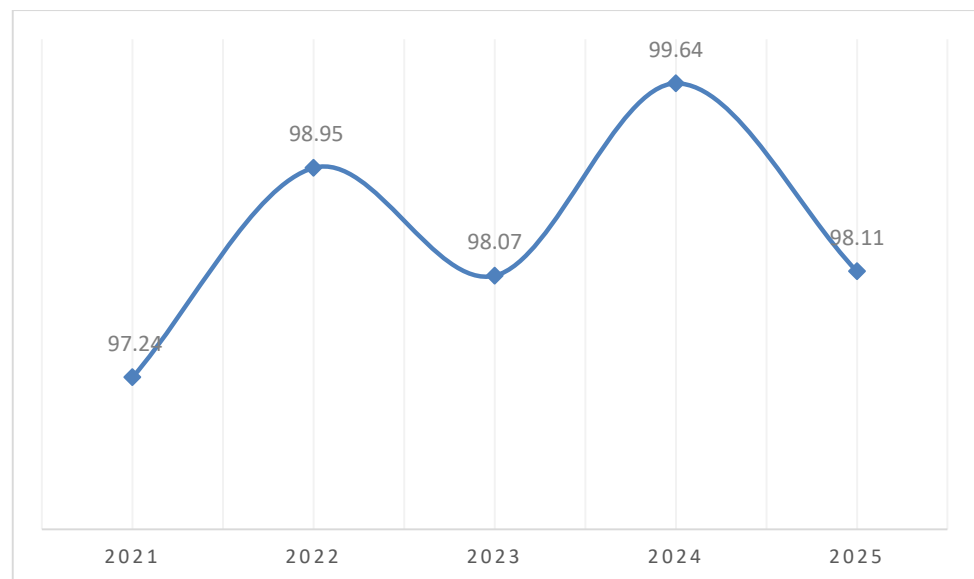
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	100	98,11	98,11

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Persentase tersebut meningkat dari 97,24% pada tahun 2021 menjadi 98,95% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 98,07%. Selanjutnya kembali meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,64%, sebelum sedikit menurun menjadi 98,11% pada tahun 2025. Perkembangan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 pada periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.26. Perkembangan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 adalah sebagai berikut:

- a) Pendataan rutin guru SMA, SMK, dan SLB untuk pemetaan kualifikasi
- b) Memberikan apresiasi/penghargaan bagi guru terbaik
- c) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program izin belajar dan tugas belajar bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 antara lain:

- a) Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi S1/D4, terutama guru senior dan guru di daerah terpencil
- b) Faktor usia guru yang mendekati masa pensiun menyebabkan rendahnya motivasi melanjutkan studi

Untuk meningkatkan persentase kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4 di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Guru yang masih berijazah di bawah S1/D4 diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal S1/D4 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- b) Meningkatkan pemetaan lintas kabupaten/kota dan penataan distribusi guru

2) **Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri**

- a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Tahun 2025 ini, indikator Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri ditargetkan 60%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan

perubahan penetapan target menjadi 60,93% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.52. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	60,93	61,46	100,86	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

Indikator kinerja persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri di tahun 2025 ditargetkan 60,93% terealisasi 61,46% dengan tingkat capaian 100,86% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah guru yang mengikuti magang kerja di industri}}{\text{Jumlah seluruh guru SMK}} \times 100\% = \frac{397}{646} \times 100\% = 61,46\%$$

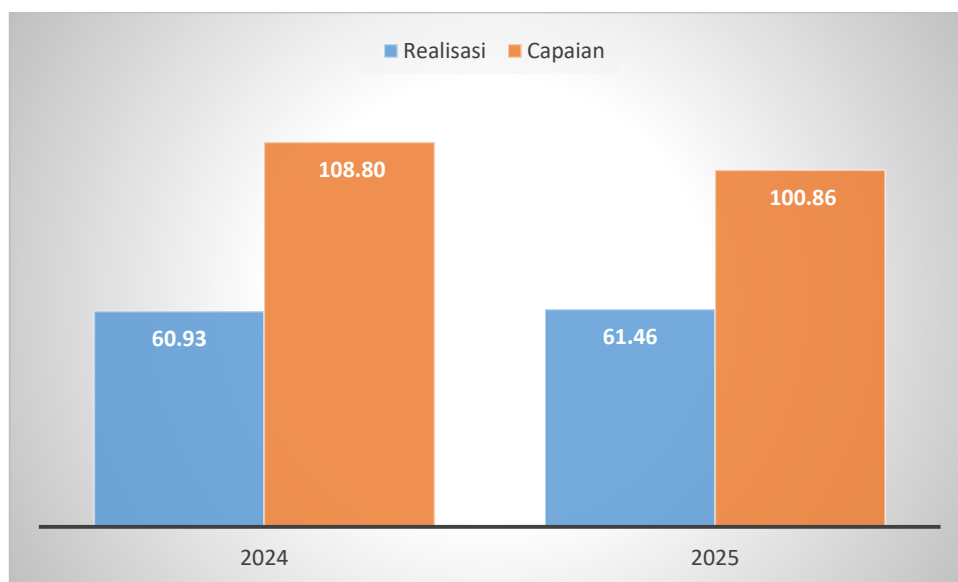
Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri dihitung menggunakan rumus Jumlah guru yang mengikuti magang kerja di industri sebanyak 397 orang dibagi Jumlah seluruh guru SMK sebanyak 646 orang, sehingga didapat persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri adalah 61,46%.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator kinerja Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri sebesar 100,86% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 7,94%

di tahun 2025. Namun, secara absolut nilai Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri tahun 2025 meningkat 0,53 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.27. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 65%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 61,46% menunjukkan pencapaian sebesar 94,55% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.53. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

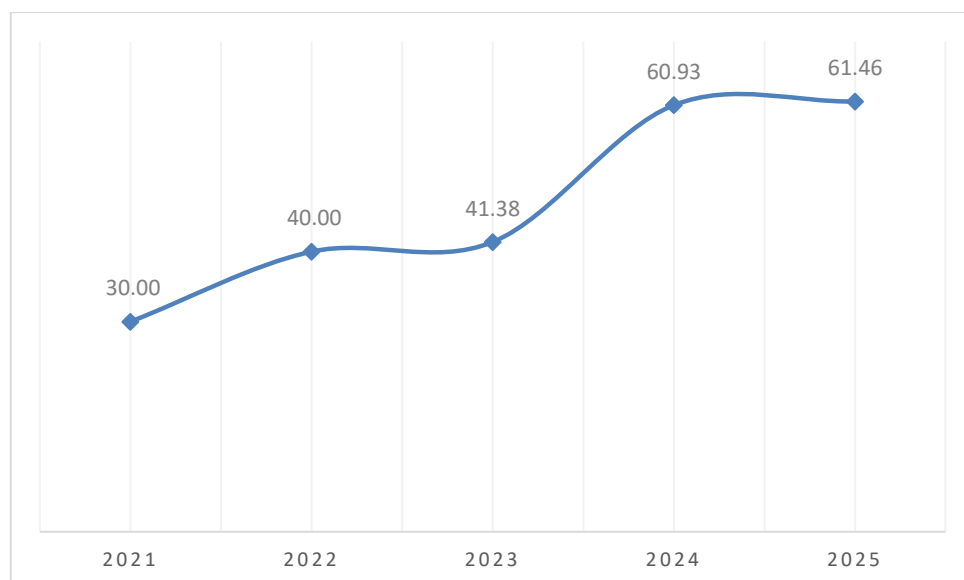
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	65	61,46	94,55

Sumber : diolah dari rekapitulasi data Dinas Pendidikan Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025 sebesar 61,46%. Perkembangan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik:

Grafik 3.28. Perkembangan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk realisasi indikator persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat minat guru untuk mengikuti magang kerja di Industri
- b) Meningkatkan pemetaan dan penataan pendidik lintas kabupaten/kota pada jenjang pendidikan dibawah wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri antara lain:

- a) Masih kurangnya SMK unggul berbasis potensi daerah
- b) Belum terpenuhinya kualitas guru secara merata khususnya di daerah 3T

Untuk meningkatkan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Penguatan revitalisasi SMK untuk dukung pengalaman guru
- b) Optimalisasi pengelolaan pendidikan dengan fokus pengembangan karir dan kolaborasi industri untuk pemerataan kualitas pendidik

3) Persentase Guru yang bersertifikasi

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025 ini, indikator Persentase Guru yang bersertifikasi ditargetkan 64%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan perubahan penetapan target menjadi 65,90% berdasarkan hasil evaluasi LAKjIP tahun lalu karena realisasi indikator

telah mencapai target yang tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

- b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.54. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Guru yang bersertifikasi	65,90	71,88	109,08	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

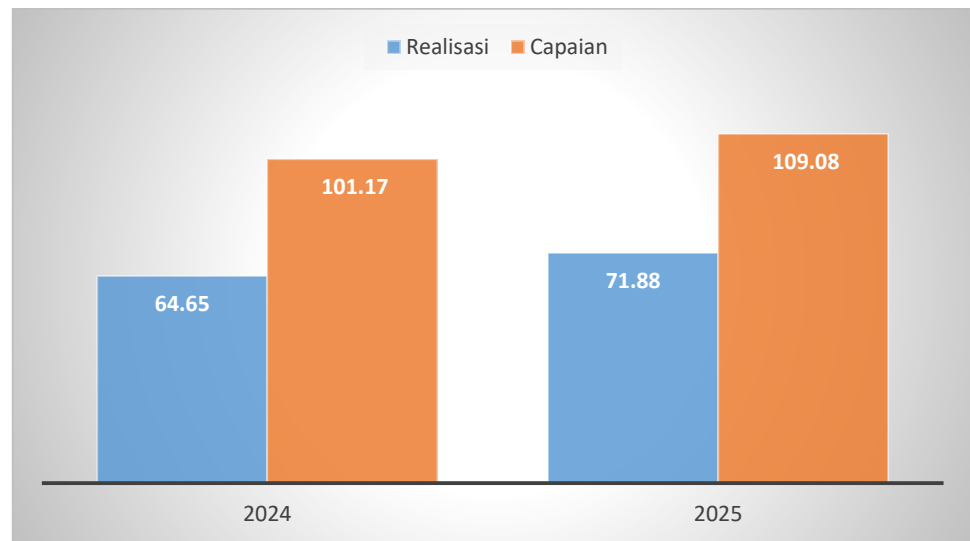
Indikator kinerja Persentase Guru yang bersertifikasi di tahun 2025 ditargetkan 65,90% terealisasi 71,88% dengan tingkat capaian 109,08% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah guru yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100\% = \frac{13.618}{18.945} \times 100\% = 71,88\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi indikator persentase guru yang bersertifikasi dihitung menggunakan rumus Jumlah guru yang bersertifikasi sebanyak 13.618 dibagi Jumlah seluruh guru sebesar 18.945, sehingga didapat persentase guru yang bersertifikasi adalah 71,88%.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator kinerja persentase guru yang bersertifikasi sebesar 109,08% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini meningkat 7,90% di tahun 2025. Dan secara absolut nilai persentase guru yang bersertifikasi tahun 2025 juga mengalami peningkatan 7,23 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.29. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase guru yang bersertifikasi pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 66%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 71,88% menunjukkan pencapaian sebesar 108,91% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan telah berhasil dapat mencapai target tahun terakhir periode Renstra tersebut di tahun 2026 mendatang.

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase guru yang bersertifikasi	66	71,88	108,91

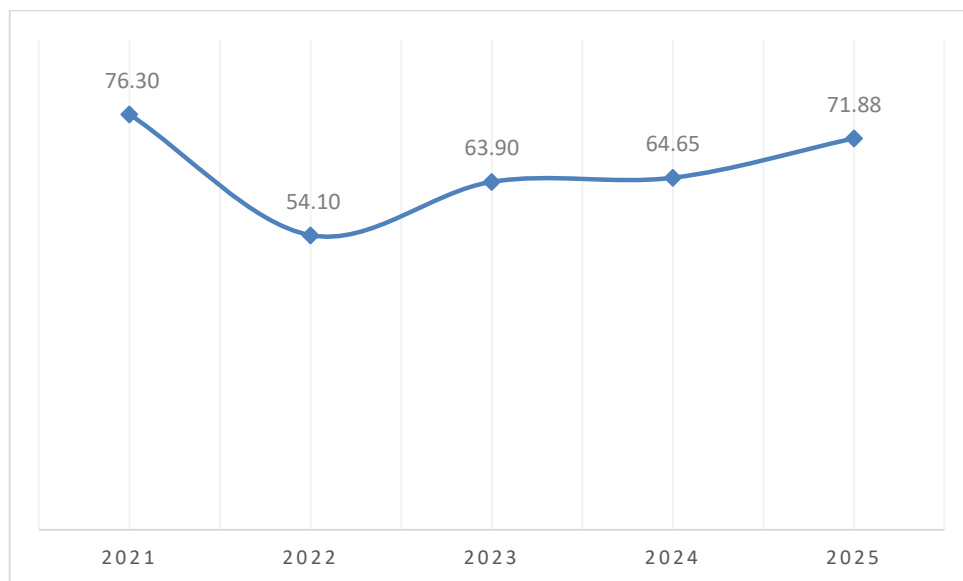
Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase guru yang bersertifikasi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 persentase guru yang

bersertifikasi tercatat sebesar 76,30%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 54,10%. Selanjutnya persentase tersebut kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, serta mencapai 71,88% pada tahun 2025. Perkembangan persentase guru yang bersertifikasi pada periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.30. Perkembangan persentase guru yang bersertifikasi dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator persentase guru yang bersertifikasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase guru yang bersertifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pengusulan penerbitan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) untuk penerima TPG (Tunjangan Profesi Guru)
- b) Melakukan sosialisasi TPG

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase guru yang bersertifikasi antara lain:

a) Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dibuka tidak linier dengan ijazah, menyebabkan guru tidak memenuhi syarat akses PPG sesuai bidang studinya

b) Keterbatasan akses PPG di daerah terpencil Sumatera Barat

Untuk meningkatkan persentase guru yang bersertifikasi di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

a) Mempercepat usulan SKTP TPG

b) Mendorong secara intensif kepada guru agar memiliki sertifikat pendidik

4) **Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4**

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025, Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 ditargetkan 95,95%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.56. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	95,95	93,72	97,68	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

Indikator kinerja Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 di tahun 2025 ditargetkan 95,95% terealisasi 93,72% dengan tingkat capaian 97,68%% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kependidikan yang berpendidikan S1/D4}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kependidikan}} \times 100\% = \frac{3.868}{4.127} \times 100\% = 93,72\%$$

Formulasi dalam memperoleh realisasi persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 dihitung menggunakan rumus Jumlah tenaga kependidikan yang berpendidikan S1/D4 sebanyak 3.868 orang dibagi Jumlah seluruh tenaga kependidikan sebesar 4.127 orang, sehingga didapat persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 adalah 93,72%. Berikut data dukung dalam memperoleh realisasi indikator persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4:

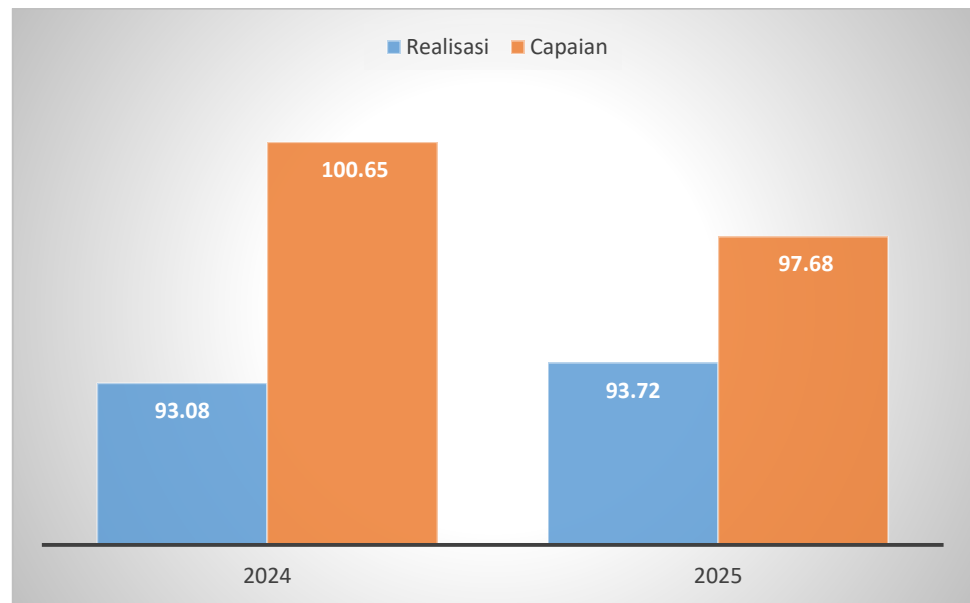
Tabel 3.57. Data dukung indikator persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4

Jenjang	Jumlah tenaga kependidikan min. S1/D4	Jumlah seluruh tenaga kependidikan	%Capaian
SMA	2.251	2.392	94,11
SMK	1.349	1.451	92,97
SLB	268	284	94,37
TOTAL	3.868	4.127	93,72

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator kinerja persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 sebesar 97,68% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan 2,97% di tahun 2025. Namun, secara absolut nilai persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 tahun 2025 meningkat 0,64 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.31. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 100%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 93,72% menunjukkan pencapaian sebesar 93,72% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

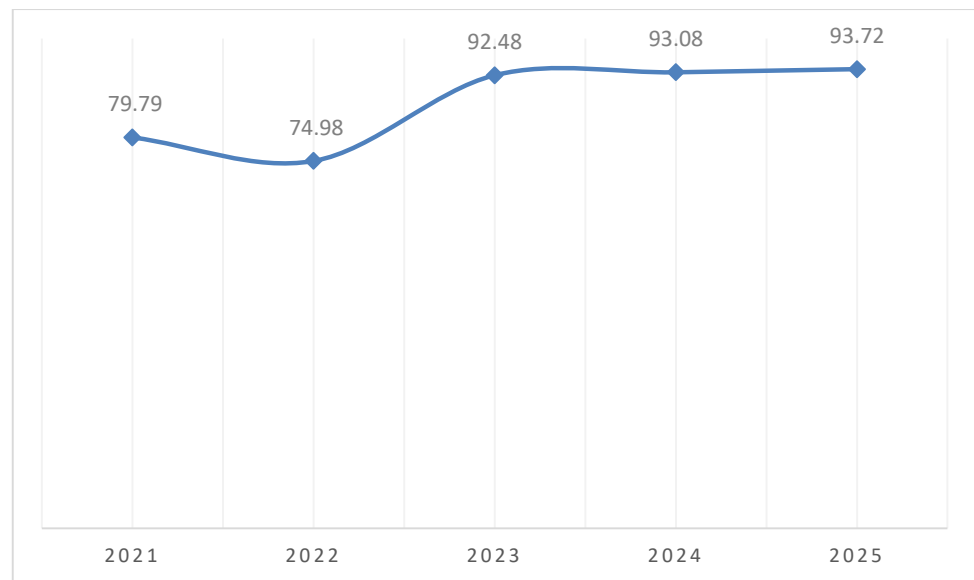
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	100	93,72	93,72

Sumber : diolah dari data Dapodik Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 menunjukkan tren peningkatan secara umum. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, persentase tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar 93,72%. Perkembangan persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 pada periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.32. Perkembangan persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemetaan dan pendistribusian tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- b) Memberikan apresiasi/penghargaan bagi tenaga kependidikan terbaik
- c) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik tenaga kependidikan melalui program izin belajar dan tugas belajar bagi tenaga kependidikan yang belum berkualifikasi S1/D4

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 antara lain:

- a) Masih terdapat beberapa jabatan di satuan pendidikan yang tidak mempersyaratkan tenaga kependidikan minimal S1/D4
- b) Faktor usia tenaga kependidikan yang mendekati masa pensiun menyebabkan rendahnya motivasi melanjutkan studi

Untuk meningkatkan persentase kualifikasi tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4 di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 melalui penguatan sinergi dengan perguruan tinggi lokal untuk program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), sehingga tenaga kependidikan tetap dapat menjalankan tugas tanpa mengganggu kewajiban kerja
- b) Melakukan pendataan dan pemetaan kualifikasi tenaga kependidikan secara berkala

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebanyak 9 orang pegawai pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (P.GTK) di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berperan dalam pengelolaan dan pembinaan terhadap 11.114 guru yang tersebar pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sumatera Barat.

b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pemanfaatan pertemuan daring menggunakan aplikasi Zoom dalam pelaksanaan rapat koordinasi pendidikan dengan satuan pendidikan maupun kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, seiring dengan kebijakan peniadaan pelaksanaan kegiatan di hotel

c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebesar Rp.92.684.917.746,- terealisasi sebesar Rp.84.933.226.720,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 91,64%. Sisa anggaran sebesar Rp.7.751.691.026,- (8,36%) berasal dari efisiensi makan minuman rapat dan aktivitas lapangan, belanja honorarium narasumber internal (50 %), perjalanan dinas biasa/transport narasumber, belanja hadiah bersifat perlombaan dengan jumlah peserta atau pemenang tidak memenuhi kuota hadiah, sisa uang BKK Cabang Dinas Wilayah VI (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat) yang 50 % lagi tidak bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten, serta bertambahnya lulusan PPPK di Cabang Dinas Wilayah VIII (Keb. Kep. Mentawai).

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 101,52% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 74,71%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi =

$$\frac{(Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran}{Pagu Anggaran} \times 100\%$$

$$= \frac{(Rp 92.684.917.746 \times 101,52\%) - Rp 84.933.226.720}{Rp 92.684.917.746} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp 9.160.501.776}{Rp 92.684.917.746} \times 100\% = \mathbf{0,10}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,10}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 74,71\%$$

Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp.92.684.917.746,- yang mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan berada pada dua program dengan masing-masing kegiatan yaitu:

- (1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kegiatan: Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan total 2 sub kegiatan
- (2) Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan total 3 sub kegiatan

Masing-masing sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.59. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	1 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	dokumen	1	dokumen	220.088.511	184.172.511
	2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri			2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	laporan	1	laporan	273.281.500	211.881.000
	3. Persentase Guru yang bersertifikasi									
	4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang	2 Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	184	satuan pendidikan	184	satuan pendidikan	59.966.852.215	54.989.379.130

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
	berpendidikan minimal S1/D4		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	84	satuan pendidikan	84	satuan pendidikan	29.282.228.152	26.733.771.279
			3 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	32	satuan pendidikan	32	satuan pendidikan	2.942.467.368	2.814.022.800
								TOTAL	92.684.917.746	84.933.226.720

6. Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP sangat terkait dengan bagaimana Dinas Pendidikan mampu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan komponen-komponen yang membangun SAKIP. Dinas Pendidikan menetapkan meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan. Pengukuran indikator ini didasarkan pada nilai evaluasi tahun *n* terhadap implementasi SAKIP Dinas Pendidikan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan ditargetkan 80,4 (A). Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan di tahun 2025 ditargetkan 80,40 (A) terealisasi 70,17 (BB) dengan tingkat capaian 87,28% termasuk kategori keberhasilan Tinggi.

Tabel 3.60. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	80,40 (A)	70,17 (BB)	87,28	Tinggi

Sumber : diperoleh dari LHE SAKIP Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja ini didasarkan pada nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Juli 2025, No: 700/155/LHE/INSP/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

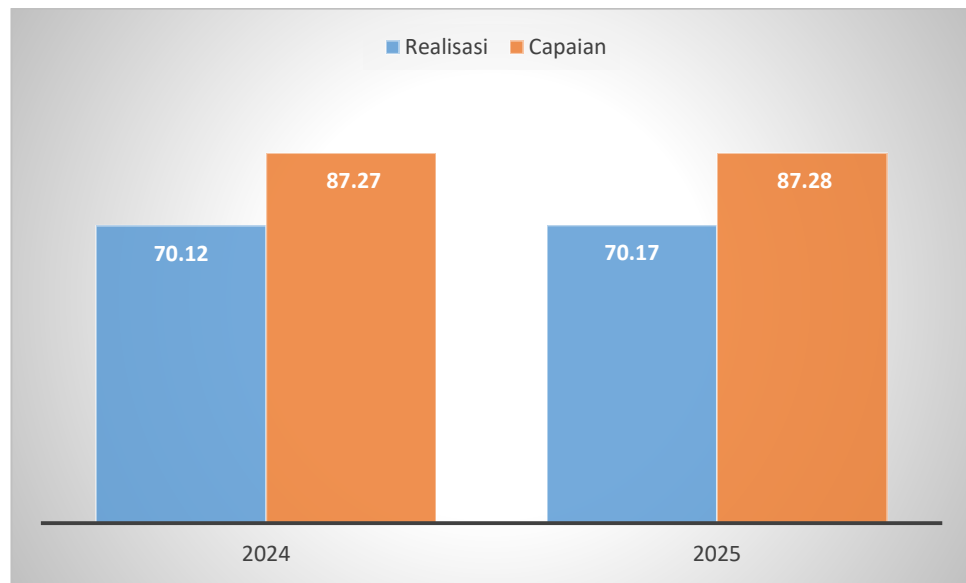
Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **70,17** dengan kategori **BB** dengan pengertian Sangat Baik, dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,03
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,39
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Internal	25,00	16,75
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		70,17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Sumber : diperoleh dari LHE SAKIP Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebesar 87,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini berada pada kondisi stabil dan terjaga meskipun peningkatan tersebut relatif kecil sebesar 0,01% di tahun 2025. Begitupun secara absolut nilai realisasi tahun 2025 hanya mengalami sedikit kenaikan 0,05 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.33. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 80,45. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 70,17 menunjukkan pencapaian sebesar 87,22% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	80,45	70,17	87,22

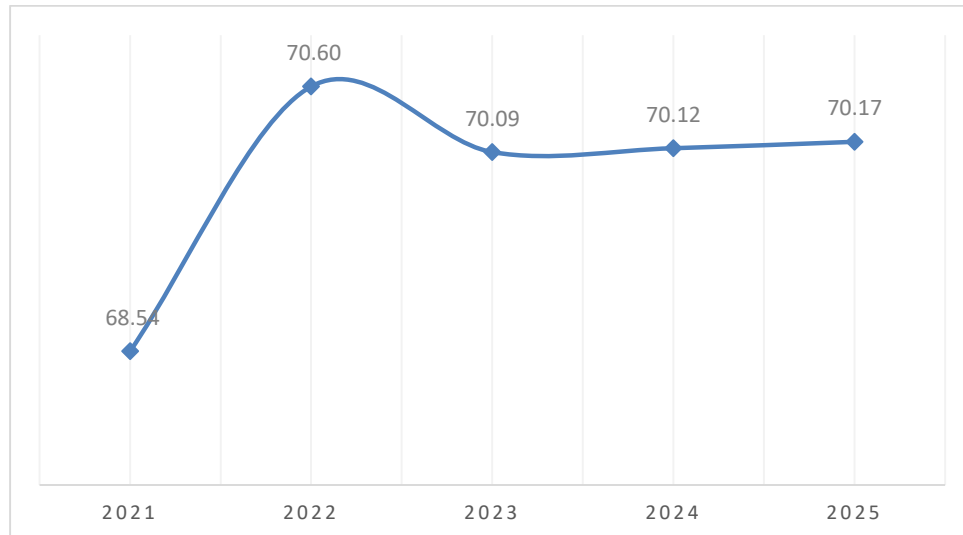
Sumber : diperoleh dari LHE SAKIP Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 4 tahun terakhir.

Capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP

setiap tahunnya. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan pada periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.34. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Untuk realisasi indikator nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.
- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:
- Penyusunan Renja dan Renstra yang selaras RPJMD
 - Implementasi melalui e-SAKIP
 - Peningkatan indikator kinerja
- Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan antara lain:
- Kategori nilai SAKIP belum mencapai target A
 - Keterbatasan anggaran sehingga beberapa capaian indikator di bawah target

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Penguatan e-SAKIP dan evaluasi
- b) Meningkatkan inovasi sebagai bentuk untuk meningkatkan SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Implementasi SAKIP dilaksanakan secara terintegrasi melalui pelibatan seluruh unit kerja. Sebanyak 177 ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memahami dan menguasai penerapan SAKIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja dinilai telah cukup memadai. Tindak lanjut ke depan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit kerja guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

- c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar Rp.1.831.244.119.736,- terealisasi sebesar Rp.1.688.555.431.641,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 92,21%. Sisa anggaran sebesar Rp.142.688.688.095,- (7,79%) berasal dari efisiensi makan minum rapat, uang lembur, perjalanan dinas (sisa penginapan dan 30% penginapan), pembayaran honor narasumber internal 50%, serta efisiensi kegiatan dikarenakan peserta tidak disediakan makan dalam kegiatan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan 87,28% dengan pagu

dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 37,68%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Tingkat Efisiensi} &= \\
 &= \frac{(\textit{Pagu Anggaran} \times \textit{Capaian Kinerja}) - \textit{Realisasi Anggaran}}{\textit{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\text{Rp } 1.831.244.119.736 \times 87,28\%) - \text{Rp } 1.688.555.431.641}{\text{Rp } 1.831.244.119.736} \times 100\% \\
 &= \frac{-\text{Rp } 90.245.563.935}{\text{Rp } 1.831.244.119.736} \times 100\% = \mathbf{-0,05}
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\textit{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{-0,05}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= \mathbf{37,68\%}
 \end{aligned}$$

- i. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Anggaran sebesar Rp.1.831.244.119.736,- yang mendukung capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 2 kegiatan yaitu Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan, dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 sub kegiatan. Masing-masing sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.62. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	3	dokumen	93.603.500	79.340.000
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	1	dokumen	188.844.185	185.658.461
				3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	1	laporan	42.174.000	32.090.000
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	12	bulan	1.828.473.219.572	1.685.927.213.425
				2 Penyediaan Administrasi	1	dokumen	1	dokumen	2.116.987.479	2.087.348.755

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)
					Target		Realisasi			
				Pelaksanaan Tugas ASN						
				3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	1	dokumen	28.424.000	11.180.000
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	44.252.000	27.670.000
				5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	dokumen	1	dokumen	68.999.000	41.245.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)	
					Target		Realisasi				
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	laporan	1	laporan	187.616.000	163.686.000
TOTAL									1.831.244.119.736	1.688.555.431.641	

7. Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Dinas Pendidikan menetapkan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pengukuran indikator ini didasarkan pada hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebagai berikut:

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

a. Dasar penetapan target indikator kinerja

Untuk tahun 2025, tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan ditargetkan 91%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Dinas Pendidikan.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan di tahun 2025 ditargetkan 91% terealisasi 86% dengan tingkat capaian 94,51% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Tabel 3.63. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91	86	94,51	Sangat Tinggi

Pencapaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahunan Tahun 2025. Berikut hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan:

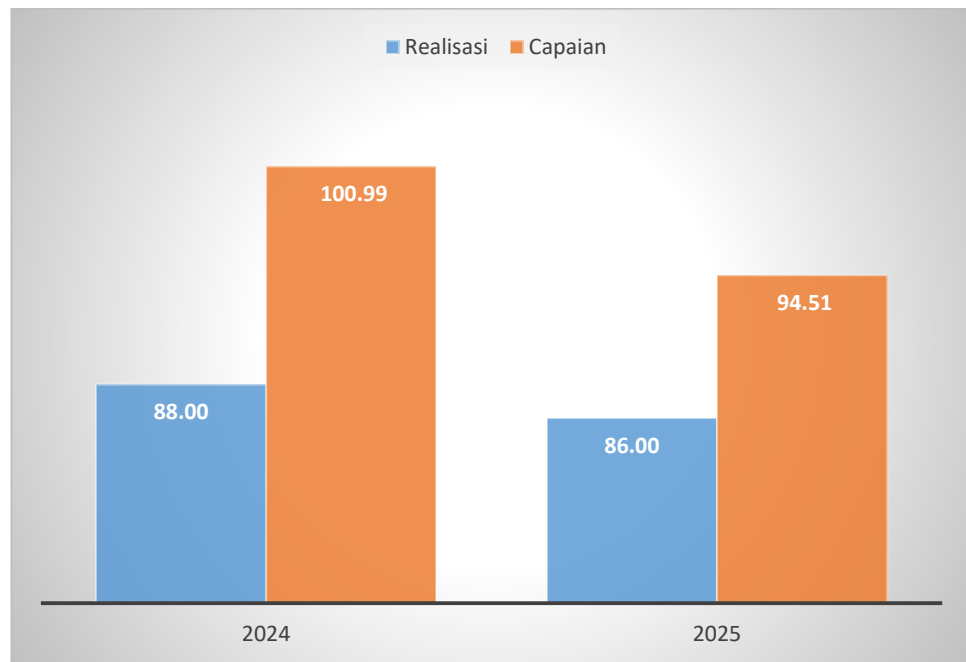
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025						
86 (BAIK)						Responden Jumlah : 1.435 responden
No	Unsur Pelayanan	Nilai TW1	Nilai TW2	Nilai TW3	Nilai TW4	
1	Kesesuaian syarat pelayanan dengan jenis pelayanan (X1)	3,32	3,44	3,41	3,24	Triwulan I responden 249
2	Ketepatan waktu pelayanan (X2)	3,20	2,55	3,38	3,2	Triwulan II responden 627
3	Biaya Layanan (X3)	3,99	3,90	3,39	3,55	Triwulan III 60 responden
4	Kemudahan prosedur pelayanan (X4)	3,32	3,86	3,36	3,29	Triwulan IV 169 responden
5	Penanganan Pengaduan (X5)	3,46	3,50	3,40	3,24	
6	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan (X6)	3,29	3,40	3,35	3,24	PERIODE SURVEI 1 Januari s.d 31 Desember 2025
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan (X7)	3,28	3,41	3,41	3,33	
8	Kompetensi Pelaksana (X8)	3,24	3,37	3,36	3,31	
9	Kualitas sarana dan prasarana (X9)	3,22	3,39	3,33	3,57	
3,45						
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN INSTITUSI KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI KAMI.						

Sumber : diperoleh dari laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan Tahun 2025

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan sebesar 94,51%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan penurunan sebesar 6,48% di tahun 2025. Jika dilihat secara absolut tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan tahun 2025 hanya sedikit menurun 2 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025 disajikan pada grafik.

Grafik 3.35. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target tahun terakhir indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan diharapkan tercapai 100%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 86% menunjukkan pencapaian sebesar 86% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dinas Pendidikan optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Tabel 3.64. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026

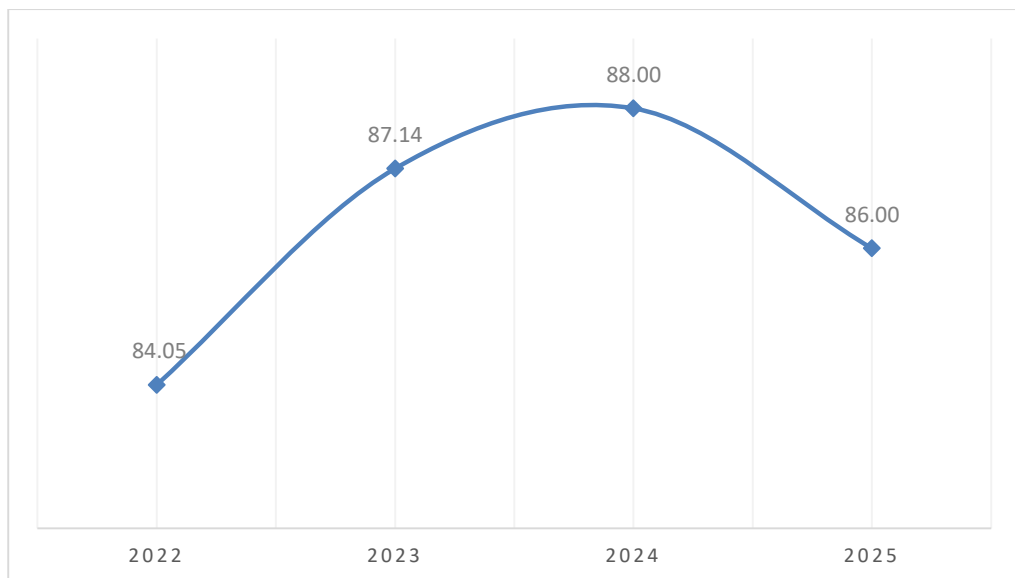
Indikator	Target Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2025	%Capaian
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	100	86	86

Sumber : diperoleh dari laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan Tahun 2025

- e. Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 3 tahun terakhir.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan mulai dilaksanakan pada tahun 2022 seiring dengan dimulainya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 88%. Perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendidikan pada periode tahun 2022–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.36. Perkembangan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan dari tahun 2021-2025



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

- f. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pelayanan sesuai SOP

- b) Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan melalui sosialisasi/bimtek
- c) Merehabilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana layanan

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan antara lain:

- a) Kuantitas dan kualitas SDM yang memberikan layanan masih terbatas sehingga menyebabkan keterbatasan dalam cakupan dan kualitas layanan yang diberikan
- b) Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang layak digunakan, mencakup peralatan dan fasilitas yang memerlukan rehab atau penggantian

Untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk:

- a) Meningkatkan upaya yang konsisten dalam kualifikasi dan keterampilan SDM yang memberikan layanan, seperti pelatihan dan pengembangan
- b) Mengadakan sarana dan prasarana bertahap untuk merehabilitasi fasilitas yang kurang/tidak layak
- c) Melakukan pemeliharaan secara berkala agar sarana dan prasarana selalu berfungsi optimal
- d) Mengupayakan sistem yang responsif terhadap perubahan peraturan dan ketentuan di tingkat daerah yang berdampak pada jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten

Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 177 pegawai yang tersebar pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Dengan jumlah pegawai tersebut, Dinas Pendidikan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kepada sebanyak 767 satuan pendidikan yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

b) Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diwujudkan melalui keberadaan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Pendidikan, pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan, serta penyusunan laporan tahunan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan organisasi Dinas Pendidikan setiap tahunnya.

c) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Anggaran yang disediakan dalam APBD-P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi adalah sebesar Rp.25.548.589.696,- terealisasi sebesar Rp.24.169.183.547,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 94,60%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.379.406.149,- (5,71%) berasal dari efisiensi kegiatan, makan minum rapat, belanja cetak spanduk, spesifikasi pengadaan peralatan dan mesin lainnya tidak sesuai harga, hanya beberapa PC yang memerlukan pemeliharaan peralatan mesin lainnya, realisasi penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas, serta penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lebih kecil dari pagu anggaran.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi 94,51% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 49,77%. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Tingkat Efisiensi} &= \\
 &= \frac{(\textit{Pagu Anggaran} \times \textit{Capaian Kinerja}) - \textit{Realisasi Anggaran}}{\textit{Pagu Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{(\text{Rp } 25.548.589.696 \times 94,51\%) - \text{Rp } 24.169.183.547}{\text{Rp } 25.548.589.696} \times 100\% \\
 &= \frac{-\text{Rp } 23.211.425}{\text{Rp } 25.548.589.696} \times 100\% = -0,001
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{\textit{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{-0,001}{20} \times 50 \right) \\
 \textit{Nilai Efisiensi} &= 49,77\%
 \end{aligned}$$

- i. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Anggaran sebesar Rp.25.548.589.696,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 kegiatan dan dengan total 21 sub kegiatan. Masing-masing sub kegiatan ini mempunyai output yang tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.65. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	1	dokumen	2.806.600.000	2.708.656.489
					2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	38.400.000	38.400.000
			2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50	paket	50	paket	3.374.763.400	3.365.144.500
					2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	orang	-	orang	1.880.000	-
					3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	orang	-	orang	16.572.000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
			3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	paket	9	paket	41.763.912	41.282.750
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	1	paket	2.330.455.800	2.099.188.000
					3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10	paket	10	paket	844.008.003	793.595.209
					4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	paket	10	paket	104.011.725	84.927.050
					5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	dokumen	1	dokumen	74.999.750	74.739.000
					6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	laporan	10	laporan	3.726.424.530	3.039.752.526
			4	Pengadaan Barang Milik	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22	unit	21	unit	131.149.714	113.929.500

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	78.240.000	78.240.000	
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	79.600.000	79.600.000	
			5	Penyediaan Jasa	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	laporan	9	laporan	30.812.150	30.793.100
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	10	laporan	10	laporan	977.118.400	846.309.247	
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	laporan	5	laporan	175.000.000	175.000.000	
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	laporan	10	laporan	9.654.276.612	9.560.554.873	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume				Pagu APBD-P (Rp)	Realisasi (Rp)		
					Target		Realisasi					
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	unit	8	unit	443.541.000	432.285.708
					2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	unit	10	unit	248.972.700	242.321.620
					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	370.000.000	364.463.975
										TOTAL	25.548.589.696	24.169.183.547

3.4. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program 15 Kegiatan dan 215 Sub Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp. 2.602.371.983.000,- terealisasi sebesar Rp.2.421.756.135.106,- (93,06%). Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar 6,94%. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai tujuan meningkatnya kualitas pendidikan. Berikut disajikan hubungan antara Sasaran dengan Pagu anggaran dan realisasinya dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.66. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	476.461.282.529	466.803.213.666	97,97
2	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	105.103.690.600	99.620.499.197	94,78
3	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	28.428.394.000	24.314.175.366	85,53
4	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	42.900.988.693	33.360.404.969	77,76
5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	92.684.917.746	84.933.226.720	91,64
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1.831.244.119.736	1.688.555.431.641	92,21
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	25.548.589.696	24.169.183.547	94,60
DINAS PENDIDIKAN		2.602.371.983.000	2.421.756.135.106	93,06

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja. Untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja sesuai dengan amanat yang telah menjadi janji Dinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta 18 (delapan belas) target kinerja yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut.

Sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 relatif baik dan berhasil. Tingkat keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kinerjanya tinggi di tahun 2025. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LAKjIP Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu yang telah ditentukan, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara efektif sehingga dapat di realisasikan dengan baik.
2. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan dengan lebih intensif lagi.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan.

LAMPIRAN 1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152-31513 Padang

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	84,49 %
		2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	81,93 %
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase SMA Negeri terakreditasi	99,58 %
		2. Persentase SMK Negeri terakreditasi	99,14 %
		3. Persentase SLB Negeri terakreditasi	93,33 %
3.	Meningkatnya kompetensi dan karakter peserta didik	1. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	76,08 %
		2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	62,48 %
4.	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	81,98 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		2. Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	67,93 %
		3. Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	54,14 %
		4. Jumlah SMK yang terevitalisasi	52 unit
5.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4	99,64 %
		2. Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	60,93 %
		3. Persentase Guru yang bersertifikasi	65,90 %
		4. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan yang berpendidikan minimal S1/D4	95,95 %
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,4 (A)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 1.806.091.777.125	APBD-P
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 702.084.118.864	APBD-P
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 81.227.000	APBD-P
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 493.370.011	APBD-P
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Rp 19.569.000	APBD-P
	JUMLAH	Rp 2.508.770.062.000	APBD-P

Padang, 25 Agustus 2025

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

LAMPIRAN II. PENGHARGAAN YANG DIDAPAT TAHUN 2025

DAFTAR PENGHARGAAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	2025
2	Wajib Pajak Pengelola APBD Setoran Terbesar kota Padang tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	Direktorat Jenderal Pajak	2025
3	Apresiasi atas Komitmen Dedikasi, dan Kinerja Luar Biasa dalam Perencanaan Pelaksanaan, serta Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Gubernur Sumatera Barat	2025
4	Mengawasi Penyelenggaraan Penerimaan Anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2024 Panda Polda Sumbar	Polda Sumbar	2025

DAFTAR GURU BERPRESTASI DINAS PENDIDIKAN SUMBAR TAHUN 2025

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
1	Titi Hidayani A, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
2	Nelfi Yentriati, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
3	Rini Leja, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
4	Seprah Madeni, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
5	Aziz Prima, S.Pd, Mm	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
6	Arizon, S.Pd, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
7	Zahroni, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
8	Sumarmo, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
9	Hasmi Gustin Rosa, S.Pd, M.Si	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
10	Dra. Enny Sasmita, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
11	Zulkifli, S.Pd, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
12	Ita Desnatalia, M.Pd.	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
13	Yunita Rosanti, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
14	Netra Suriyanto, S.Pd, M.Pd.E	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
15	Asnal Maksum, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
16	Rina Agustina, Sp. S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
17	Mukhsim, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
18	Tika Hendrawati, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
19	Azizah, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
20	Dahlia, S.Pd, Gr	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
21	Yusnita, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
22	Ferawati Desra, S.Si, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
23	Ayu Putri Anggriawan, S.Pd, Gr	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
24	Annisa Putri, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
25	Eva Murni Susanti, S.Pd, Gr	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
26	Gylang Alhamdina, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
27	Yulfi Demitra, S.Si	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
28	Riza Asfa, M.Si	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
29	Elsi Heviana, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
30	Trigina Nova Yolanda, S.Pd, M.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
31	Natia Afriana Suri, S.Pd., M.Pd.	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
32	Anniversary Hamidah, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
33	Sri Gusnawati, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
34	Endang Setia Rini, S.Pd.	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
35	Geby Fitriya Adrian, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
36	Elia Gustri, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
37	Wedda Hidayana, S.Kom, M.Pd.T	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
38	Efrida Yanty, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
39	Rio Nugraha, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
40	Maya Yulia Ningsih, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
41	Rahmatul Khairi, S.Pd, Gr	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
42	Dra. Lifya	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
43	Ayu Purnama Sari, S.Pd, Gr	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
44	Yenni Ramahdiah, S.Si	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
45	Siti Annisa, A.Md	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
46	Uci Permata Sari, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
47	Shelly Sukmawati A.Md	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
48	Ade Putra, A. Md	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
49	Yulia Ethika Amd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
50	Annisa Rahmawati A.Md.T	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
51	Rizky Aditiya Pratama A.Md.T	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
52	Elju Fitriana	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
53	Lusi Wulandari, Se	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
54	Ali Imran, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
55	Riva Yullanda, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
56	Afifah Pebriany , A. Md	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
57	Khori Azizah Muslimah, S.Pd	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
58	Tommy Edrian, S.M	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
59	Lisanul Sidqi	KORPRI	Tingkat Nasional
60	Dilla Rahmi	DIRJEN GTK	Tingkat Nasional
61	Riana Dewi	BGTK	Tingkat Provinsi
62	Hendra Putra	BGTK	Tingkat Provinsi
63	Hayatul Najmi	BGTK	Tingkat Provinsi
64	Yeni Kurniawati	BGTK	Tingkat Provinsi
65	Yenni Ramahdiah	Disdik Prov Sumbar	Tingkat Provinsi
66	Masna Dewita, S. Pdi	Direktur Cv. Divya Cahaya Prestasi	Nasional
67	Sri Husnihayati Dwi Putri, S.S., M. Pd	Perkumpulan Rumah Seni Asnur (Perruas)	Nasional
68	Amperiyenti Jaya,S.Pd	Pemred Goresan Pena	Nasional
69	Amperiyenti Jaya,S.Pd	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Nasional
70	Amida, S.Pd	Dr.Akhirudin, S.H., S.Pd, M.Pd	Nasional
71	Wiwik Rince Jelita, S.Pd.,M.Pd	Sri Yulianti, M.Pd	Nasional
72	Tim Randai Kreasi 1 Junjung Sirih	Pimpinan Sangar Tuah Sepakat	Provinsi
73	Cici Yandes, S.Pd	Balai Guru Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat	Provinsi

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
74	Rini Susanti, S.Pd, Mm	Balai Guru Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Barat	Provinsi
75	Elwizar	BGTK Provinsi Sumatera Barat	Provinsi
76	Widya Sari Novita, S.Pd	BGTK Provinsi Sumatera Barat	Provinsi
77	Anniversary Hamidah, S.Pd	Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Provinsi
78	Veldry Phyto	BGTK	Tingkat Provinsi

**DAFTAR SISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
PADA LOMBA BERJENJANG SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
1	M. Arifin Ilham	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
2	Emir Al Faraz	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
3	Habbiburrahman Al Fajri	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
4	Fakhri Akbar	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
5	Zhifanna Putri Allaysa	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
6	Arib Fakhri Rahmat, Muhamad Rangga Setiawan	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
7	Arfan Suhendri, Dina Dwi Yana, Amelia Dwi Gustiara, Aprinani Septi Laila, Silva Hayati	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
8	Daniela Ulan	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
9	Amalia Ilmi Kamal	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
10	Rafky Briliano Ihksan, Hafizul Adyan	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
11	Siti Humaira Prayudi, Syaza Salsabila	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
12	Hilmi Aufa Fajrin Lifenin, Bilqies Viora Vega	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
13	Refhan Yuri Ramadhan	BPTI KEMDIKDASMEN	Tingkat Nasional
14	Assyifa Putri Azzahra	Shureido Indonesia	Tingkat Internasional
15	Azzura Ramadhani Lexem	Shureido Indonesia	Tingkat Internasional
16	Fadilla Sandy	Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pb Ipsi)	Tingkat Internasional
17	Muhammad Ruby Alhabsy	University Of Malaya Dan Royal Military College	Tingkat Internasional
18	Muhammad Dzaki	Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pb Ipsi)	Tingkat Internasional
19	Fakhri Amir	Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pb Ipsi)	Tingkat Internasional
20	Furqon Habil	Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (Pb Ipsi)	Tingkat Internasional
21	Furqon Habil	Federasi Terkait Pencak Silat Asia	Tingkat Internasional
22	Furqon Habil	Dewan Olimpiade Asia (Oca	Tingkat Internasional
23	Mhd. Irsyad Al Ghifari	Universiti Sains Islam Malaysia (Usim)	Tingkat Internasional
24	Syauqil Haq	Inkado Empowering	Tingkat Nasional
25	Shabrina Felicia Firananda	Puspresnas	Tingkat Nasional
26	Raesa Violet Riart	Kemenkeu	Tingkat Nasional
27	Hawary	Itb	Tingkat Nasional
28	Jipa	Itb	Tingkat Nasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
29	Fakhri Akbar	Puspresnas	Tingkat Nasional
30	Aqiel Raditya	Puspresnas	Tingkat Nasional
31	Ariana Asyifa Adisti	Kemenpora	Tingkat Nasional
32	Faez Al-Mahabbi	Kemenpora	Tingkat Nasional
33	Azzura Minerfa Hubbina	Kemenpora	Tingkat Nasional
34	Azzura Zahwa Geovasya	Kemenpora	Tingkat Nasional
35	Nadiva Rahadatul Aisy	Kemenpora	Tingkat Nasional
36	Qisthi Humairah	Kemenpora	Tingkat Nasional
37	Qisthi Humairah	Pengprov Ti Banten	Tingkat Nasional
38	Mariana	Puspresnas	Tingkat Nasional
39	Rafli Wahyu	Universitas Negeri Padang	Sumbar, Riau, Jambi
40	Dinul Akmal	Universitas Negeri Padang	Sumbar, Riau, Jambi
41	Mutiara Adzkia	Universitas Negeri Padang	Sumbar, Riau, Jambi
42	M. Ridho Kasyirah	Universitas Negeri Padang	Sumbar, Riau, Jambi
43	Nia Rahma	Universitas Negeri Padang	Sumbar, Riau, Jambi
44	Julian Saputra	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional
45	Ferdy Irfan Demiro	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional
46	Abdul Ghani	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional
47	Salsabilalla Joyzes Vernanda	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional
48	Muhammad Firdaus	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
49	Akbar Hidayatullah	Balai Pengembangan Talenta Indonesia	Nasional
50	Muhammad Shafix	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Nasional
51	Dinda Fahmi Rahmadani	(Popnas) Pekan Olahraga Pelajar Nasional	Nasional
52	Masyitoh	Mapel Competition Ssos Ii	Tingkat Provinsi
53	Rifdah Haaniyah Indra	Bahasa Arab	Tingkat Nasional
54	Rifdah Haaniyah Indra	Bahasa Arab	Tingkat Provinsi
55	Muhammad Ilham Syofian	Matematika	Tingkat Provinsi
56	Team Futsal	Liga Futsal	Tingkat Provinsi
57	Team Volley	Tournament Volley	Tingkat Provinsi
58	Boby Alputra	Lomba Karate Goju Ass Kumite Under Putri	Tingkat Provinsi
59	Faldi Adriansyah	Lomba Karate Goju Ass Kumite Kelas Junior	Tingkat Provinsi
60	Vanya	Lomba Karate Goju Ass Kumite Kadet Putri	Tingkat Provinsi
61	Rahsub Darius	Lomba Puisi	Tingkat Provinsi
62	Furqan Alhakimi Elyafit	Lomba Akustik	Tingkat Provinsi
63	Syavira Putri Rahmadhan	Lomba Biologi	Tingkat Provinsi
64	Rahsub Darius	Lomba Pidato Islam	Tingkat Provinsi
65	Alzakhy	Video Edukasi Di Ukm Pikmag Unand	Tingkat Provinsi
66	Natasya Dwi Murdiva	Lomba Poster Pada Ajang Pekan Kreativitas Pikmag	Tingkat Provinsi
67	Rahsub Darius	Kti Lalu Lintas	Tingkat Provinsi
68	Putri Aliya Maizara	Lomba Taekwondo Championship 2025	Tingkat Nasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
69	Rahsub Darius	Kti Lalu Lintas	Tingkat Nasional
70	Alzakhy	Jambore Generasi Hijau Jgh Xi 2025	Tingkat Nasional
71	Reysa Gusfita Sari	Kreatifitas Siswa "Web Technology"	Tingkat Provinsi
72	Anggun Maulani	Ai Skill Contest	Tingkat Nasional
73	Reysa Gusfita Sari	Ai Skill Contest	Tingkat Nasional
74	M. Ilham Jailani	Lomba Kontes Siswa Menara Agung Tingkat Regional	Tingkat Provinsi
75	Riva	Lomba Kontes Siswa Menara Agung Tingkat Regional	Tingkat Provinsi
76	Fhrizi Maisidiq Palma & Rifky Hidayat	National Essay Competition Tingkat Sma Dan Universitas Se Indonesia	Tingkat Nasional
77	Sarifah & Nivia Permata Syavira	National Essay Competition Mandalika Di Bali	Tingkat Nasional
78	Rifky Hidayat , Syarifa Fahrina & Kayla Putri Diandri	Debat Bahasa Indonesia Ldbi Propinsi 2025 Puspresnas	Tingkat Provinsi
79	Hafizul Adyan, Vigo Triugio Algawy & Akbar Jiwa Fahrizi	Lomba Vidio Reel Menabung Oleh Lembaga Keuangan Ojk Propinsi	Tingkat Provinsi
80	Hafizul Adyan & Arifan	Lomba Infografis Statistik Unp	Tingkat Provinsi
81	Fahri Ikhsan	Kompetisi Roket Air Internasional	Tingkat Internasional
82	Tim Pramuka Sman 3 Painan (Nailah Hidayah Khairani)	Lomba Pionering Tk Slta Se Indonesia, Festival Swarnadwipa Tahunan Xxxix	Tingkat Nasional
83	Rifki Hidayat, Fhirzi Maysidiq Palma & Muhammmad Farel	Lomba Teknology And Environment Universitas Putra Malaysia Kuala Lumpur	Tingkat Internasional
84	Nivia Permata Sari & Kayla Putri Diandri	Lomba Internasioanl Youth Conferenceeconomic And	Tingkat Internasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
		Law, Universitas Putra Malaysia Kuala Lumpur	
85	Afifah Humairah	Lomba Mhq, Qur'An Of Champion Santri Nasional	Tingkat Nasional
86	Hafizul Adyan & Rafky Briliano Ikhsan	Lomba Fiksi, Festival Inovasi Dan Kewiraswastaan Siswa Indonesia, Balai Pengembang Talenta Indonesia Nasional	Tingkat Nasional
87	M.Alfarish Tamel, Amanda Lubnia Athaya & Cinta	Lomba Lcc 4 Pilar, Unand Tingkat Propinsi	Tingkat Provinsi
88	Reyhan Armando Putra	Lomba Rengking 1, Ksrg Bank Indonesia Sumatera Barat Tingkat Propinsi	Tingkat Provinsi
89	Muhammad Vandrilla Al Ghazali	Lomba Rengking 1, Ksrg Bank Indonesia Sumatera Barat	Tingkat Provinsi
90	Aqil Apria Fatman, Al Faiq Athallah & Al Fathir Rezqi	Lomba Cerdas Cermat, Unp	Tingkat Provinsi
91	M.Gibran Mulyanda, Vigo Triugio Algawy & M.Haris	Lkti Pekan Ilmiah Muda, Nusantara Muda Tingkat Nasional	Tingkat Nasional
92	Gaza Hardianta	Sepak Bola	Tingkat Internasional
93	Wahyu Zetri Ilahi	Pencak Silat	Tingkat Provinsi
94	Muhammad Rhazes Alghani	Pencak Silat	Tingkat Provinsi
95	Kesi Permata Sari	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
96	Alief Sabilillah Neto	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
97	Icha Oktavia	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
98	Monica Junita Putri	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
99	Nabila Regina Putri	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
100	Cantiqueen Nofste	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
10 1	Nabila Rama Datul Isyah Ertizen	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
10 2	Olivia Fitri Irawan	Kejuaraan Kapolda Sumbar Taekwondo Championship	Tingkat Nasional
10 3	Syahira	Kejuaraan Pencak Silat Direktur Cup Se- Sematera	Tingkat Regional
10 4	Sherlyna Syafira	Kejuaraan Pencak Silat Direktur Cup Se- Sematera	Tingkat Regional
10 5	Nayla Revani Aulia	Indonesian Science & Social Competition Bidang Studi Sejarah Sma	Tingkat Nasional
10 6	Nayla Revani Aulya	Airlangga Youth Olympiad Geografi Sma/Smk/Ma	Tingkat Nasional
10 7	Hesti Neldesni	Olimpiade Generasi Emas Nusantara	Tingkat Nasional
10 8	Adrian Farel	Randori Remaja Putra Kelas 60+ Kg	Tingkat Provinsi
10 9	Launa Sintia Bella	Randori Remaja Putri Kelas 48 Kg	Tingkat Provinsi
11 0	Mardiana	Randori Remaja Putri Kelas 51 Kg	Tingkat Provinsi
11 1	Wahyu Febrian	Randori Remaja Putra Kelas 45 Kg	Tingkat Provinsi
11 2	Meisi Ayu Putri	Randori Remaja Putri Kelas 50 Kg	Tingkat Provinsi
11 3	Azifa Kania Pratiwi	Randori Remaja Putri Kelas 60+ Kg	Tingkat Provinsi
11 4	Khusnul Fadhilah	Randori Remaja Putri Kelas 45 Kg	Tingkat Provinsi
11 5	Herdinawati	Randori Remaja Putri Kelas 51+ Kg	Tingkat Provinsi
11 6	Amelia Sapitri	Randori Remaja Putri Kelas 42 Kg	Tingkat Provinsi
11 7	Effrelyn Clarissa Simamarta	Randori Remaja Putri Kelas 55 Kg	Tingkat Provinsi
11 8	Eysa Elsyken	Pencak Silat Kelas G Pra Remaja Putri	Tingkat Provinsi
11 9	Aliya Trista Saputri	Pencak Silat Kelas G Pra Remaja	Tingkat Provinsi

No	Nama Penerima Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tingkat Penghargaan
120	Fadila Agnov	Pencak Silat Kelas A Remaja Putri	Tingkat Provinsi
121	Vinza Yarvi Yanti	Pencak Silat Kelas H Pra Remaja Putri	Tingkat Provinsi
122	Adellia Nurisky	Pencak Silat Kelas F Remaja Putri	Tingkat Provinsi
123	Adrian Kelas	Pencak Silat F Remaja Putra	Tingkat Provinsi
124	Sumaya Alifatun Nisa	Pencak Silat Kelas C Remaja Putri	Tingkat Provinsi
125	Wilka Putri Kirana	Pencak Silat Kelas D Putri Pra Remaja	Tingkat Provinsi
126	Nur Ziva Mega Putri	Pencak Silat Kelas F Pra Remaja Putri	Tingkat Provinsi
127	Meri Wahyu Ningsih	Pencak Silat Kelas F Pra Remaja Putri	Tingkat Provinsi
128	Fizi Agustinadi	Pencak Silat Kelass F Pra Remaja Putra	Tingkat Provinsi
129	Mufhiq Khairury Sauva	Olimpiade Bahasa Arab	Tingkat Provinsi
130	Syukri Yandi Alfaiz	O2Sn Tahun 2024 Cabang Karate	Tingkat Provinsi
131	Firtska Al Insiyyad Haura	Kejuaraan Provinsi Tarung Drajat	Tingkat Provinsi
132	Firtska Al Insiyyad Haura	Kejuaraan Provinsi Tarung Drajat	Tingkat Nasional